



**PENGARUH PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB) DAN  
JUMLAH PENDUDUK TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  
DI PROVINSI SUMATERA BARAT**

**SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)  
Pada Program Studi Ekonomi Syariah*

**OLEH:**

**ADITYA M RIZKY**  
**NIM 2130402003**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UIN MAHMUD YUNUS  
BATUSANGKAR  
2025 M/1447**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aditya M Rizky  
NIM : 2130402003  
Program Studi : Ekonomi Syariah  
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa SKRIPSI dengan judul **“Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto dan Jumlah Penduduk Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Sumatera Barat”** merupakan karya saya sendiri, tidak mengandung unsur plagiat dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Demikian pernyataan ini dibuat dalam keadaan sadar dan tanpa ada unsur paksaan dari siapapun. Apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar.

Batusangkar, Agustus 2025  
Saya yang Menyatakan,



**Aditya M Rizky**  
**NIM. 2130402003**


## PERSETUJUAN PEMBIMBING

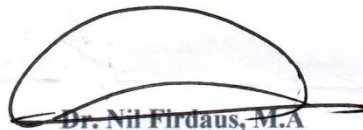
Pembimbing skripsi atas nama **Aditya M Rizky**, NIM: 2130402003  
Dengan Judul **“Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto dan Jumlah  
Penduduk Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Sumatera Barat”**,  
Memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan  
ilmiah dan dapat disetujui untuk dilanjutkan ke sidang *munaqasah*.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan  
sebagaimana mestinya.

**Ketua Program Studi  
Ekonomi Syariah**

**Batusangkar, Agustus 2025  
Pembimbing**


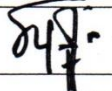

  
**Dr. Novia Nengsih, M.A.Ek**  
**NIP. 199011042019032008**

  
**Dr. Nil Firdaus, M.A**  
**NIP. 198304222020121001**

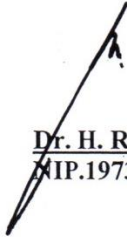
### PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi atas nama Aditya M Rizky NIM 2130402003 dengan judul: **“Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Jumlah Penduduk Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Sumatera Barat”** telah diuji dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universtas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 22 Agustus 2025 dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai syarat diperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam Program Studi Ekonomi Syariah.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana seperlunya:

No.	Nama/NIP Penguji	Jabatan dalam Tim	Persetujuan	
			Tanda Tangan	Tanggal
1.	Dr. Nil Firdaus, M.A NIP.198304222020121001	Ketua Sidang		22/8/2025
2.	Prof. Dr. H. Syukri Iska, M.Ag NIP.196310191992031004	Penguji 1		22/8/2025
3.	Rahmat Firdaus, M.E.Sy NIP.199103152023211025	Penguji 2		22/8/2025

Batusangkar, Agustus 2025  
Mengetahui  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam,

  
Dr. H. Rizal, M.Ag., CRP  
NIP.197310072002121001

## BIODATA PENULIS



### Data Pribadi

Nama : Aditya M Rizky  
Tempat / Tanggal Lahir : Padang Panjang, 30 September 2002  
Jenis Kelamin : Laki Laki  
Program Studi : Ekonomi Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
No. HP : 082241356916  
E-mail : aditmrizky30@gmail.com  
Alamat : Padang Panjang

### Nama Orang Tua

Ayah : Adris  
Ibu : Etiyarnis

### Jenjang Pendidikan

SD : SDN 09 Gumala  
SMP : SMP 5 Padang Panjang  
SMA : SMA 3 Padang Pajang  
Perguruan Tinggi : UIN Mahmud Yunus Batusangkar

### Organisasi Kampus

1. Anggota Kajian Keilmuan HMPS Ekonomi Syariah

## **MOTTO**

"Musuh terbesar dari pengetahuan bukanlah ketidaktahuan, melainkan ilusi pengetahuan"

(Stephen Hawking)

“Tidak ada mimpi yang gagal yang ada hanyalah mimpi yang tertunda. Cuma sekiranya kalau teman teman merasa gagal dalam mencapai mimpi. Jangan khawatir mimpi lain bisa diciptakan”

(Windah Basudara)

"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya..."

(QS. Al-Baqarah: 286)

Itami o kanjiro!, Itami o kangaero!, Itami o uketore!, Itami o shire!, Itami o shiranu mono ni!, Honto no heiwa wa wakaran!, Koko yori Sekai ni itami o!

(Pain Akatsuki)

"jika sesuatu yang kamu senangi tidak terjadi maka senangilah apa yang terjadi"

(Ali bin Abi Thalib)

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat, hidayah, dan karunia-Nya yang tak pernah putus mengiringi setiap langkah. Atas izin dan pertolongan-Nya, penulis akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana. Karya sederhana ini merupakan bentuk rasa syukur yang mendalam serta bukti kecil dari usaha, perjuangan, dan doa yang tak pernah berhenti. Skripsi ini penulis persembahkan dengan penuh cinta dan hormat kepada:

### **Kedua Orang Tuaku Tercinta**

Terima kasih yang tak terhingga untuk cinta pertama dalam hidupku, panutanku, Ayahanda tercinta **Adris** dan Ibunda tersayang **Etiyarnis**, sosok luar biasa yang selalu menjadi cahaya dan kekuatan dalam setiap langkahku. Terima kasih atas setiap tetes keringat, doa yang tak pernah putus, dan segala pengorbanan yang bahkan tak terucap. Kalian selalu ada di balik keberhasilanku, mendorongku untuk bangkit di saat terjatuh, serta menguatkanmu untuk terus melangkah dalam keterbatasan. Terima kasih telah percaya padaku dan mendukungku hingga sampai di titik ini. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan kesehatan, keberkahan, dan kebahagiaan dalam hidup Ayah dan Ibu. Karya ini adalah bentuk kecil dari rasa terima kasih dan bakti tulusku untuk kalian.

### **Saudara–saudara Tercinta**

Untuk Abangku Rifky, A.Md.Kom dan Fadly Aresta, S.E, terima kasih atas segala semangat dan kasih sayang yang telah kalian berikan. Kalian adalah bagian dari kekuatan dalam hidupku, yang selalu menjadi tempat pulang penuh kehangatan. Terima kasih telah menjadi penyemangat di kala lelah, dan sumber tawa di tengah penat. Semoga kita semua tumbuh menjadi insan yang saling menguatkan dan membanggakan satu sama lain.

### **Sahabat dan Teman Perjuangan**

Untuk teman-teman hebatku: **Abdul, Fuad, Afif, Aulia, Hafizh, Fdhil**, serta semua keluarga besar **Ekonomi Syariah, HMPS EKSYA 2023**, Kalian adalah bagian dari warna dalam perjalananku. Terima kasih atas tawa, pelukan semangat, ruang berbagi, dan dukungan tanpa batas. Kalian hadir bukan hanya sebagai

teman seperjuangan, tapi juga keluarga dalam fase paling penuh ujian ini. Kebersamaan kita adalah kenangan manis yang akan selalu aku syukuri. Terima kasih telah menjadi bagian dari cerita hidupku yang penuh makna.

### **Untuk Diriku Sendiri**

Terima kasih yang mendalam kepada diri sendiri, Telah bertahan sejauh ini. Untuk setiap malam yang dihabiskan dalam kelelahan, setiap pagi yang disambut dengan keraguan namun tetap di jalani, Serta setiap ketakutan yang berhasil dilawan dengan keberanian. Terima kasih kepada hati yang Ikhlas, meski tidak semua hal berjalan sesuai harapan. Terima kasih kepada jiwa yang tetap kuat, meski berkali kali hampir menyerah. Terima kasih kepada raga yang terus melangkah, meski lelah sering kali terlihat. Penulis bangga kepada diri sendiri yang telah mampu melewati berbagai fase sulit dalam kehidupan ini. Semoga ke depannya raga ini tetap kuat, hati tetap tegar, dan jiwa tetap lapang dalam menghadapi setiap proses kehidupan. Mari terus bekerja sama untuk tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari

## ABSTRAK

**Aditya M Rizky, NIM 2130402003.** Judul Skripsi “**Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto dan Jumlah Penduduk Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Sumatera Barat**”. Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar.

Permasalahan dalam penelitian ini berawal dari ketidaksesuaian antara teori dan kondisi empiris di Provinsi Sumatera Barat. Secara teori, peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan jumlah penduduk seharusnya berdampak positif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), karena tingginya aktivitas ekonomi dan bertambahnya jumlah wajib pajak dapat memperbesar penerimaan daerah. Namun, data menunjukkan bahwa meskipun PDRB dan jumlah penduduk mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, Pendapatan Asli Daerah mengalami fluktuasi.

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah kuantitatif, dengan pendekatan time series (data runtut waktu) untuk menganalisis pengaruh variabel-variabel independent terhadap variabel dependen. Teknik pengumpulan data menggunakan dokumentasi data sekunder dari instansi resmi seperti Badan Pusat Statistik (BPS). Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan regresi linear berganda yang diolah dengan aplikasi SPSS 25. Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah data tahunan selama tiga puluh tahun, yaitu dari tahun 1994 sampai dengan 2023

Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial produk domestik regional bruto berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah di Provinsi Sumatera Barat sedangkan jumlah penduduk berpengaruh negatif namun signifikan terhadap pendapatan asli daerah di Provinsi Sumatera Barat. Secara simultan produk domestik regional bruto dan jumlah penduduk berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Hasil uji determinasi menunjukkan bahwa nilai R Square sebesar 0,39 yang berarti 39% variasi pendapatan asli daerah dapat dijelaskan oleh variabel produk domestik regional bruto dan jumlah penduduk sedangkan 61% dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini

**Kata kunci :** Produk Domestik Regional Bruto, Jumlah Penduduk, Pendapatan Asli Daerah

## ***ABSTRACT***

**Aditya M Rizky, NIM 2130402003.** Thesis Title: **“The Influence of Gross Regional Domestic Product and Population on Local Own-Source Revenue in West Sumatra Province.”** Study Program of Sharia Economics, Faculty of Islamic Economics and Business, State Islamic University (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar

The problem in this research arises from the phenomenon of inconsistency between theory and empirical conditions in West Sumatra Province. Theoretically, an increase in Gross Regional Domestic Product (GRDP) and population should have a positive effect on Local Own-Source Revenue (PAD), as higher economic activity and a growing number of taxpayers are expected to increase regional revenue. However, the data show that although GRDP and population have increased from year to year, Local Own-Source Revenue has fluctuated..

The type of research used by the author is quantitative, with a time series approach to analyze the influence of independent variables on the dependent variable. The data collection technique uses secondary data documentation from official agencies such as the Central Statistics Agency (BPS). The data analysis technique in this study uses multiple linear regression processed with the SPSS 25 application. The population and sample in this study are annual data for thirty years, namely from 1994 to 2023.

Based on the results of this study, it shows that partially the gross regional domestic product has a positive and significant effect on the original regional income in West Sumatra Province, while the population has a negative but significant effect on the original regional income in West Sumatra Province. Simultaneously, the gross regional domestic product and the population have a significant effect on the original regional income. The results of the determination test show that the R Square value is 0.39, which means that 39% of the variation in original regional income can be explained by the variables of gross regional domestic product and population, while 61% is explained by other factors not included in this research model.

**Keywords:** Gross Regional Domestic Product, Population, Local Own-Source Revenue

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji dan rasa syukur terimakasih penulis ucapkan kehadirat Allah SWT yang melimpahkan Rahmat, karunia, Kesehatan dan kesempatan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto dan Jumlah Penduduk Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Provinsi Sumatera Barat”**. Shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW selaku penutup segala Nabi dan Rasul yang diutus dengan sebaik-baik agama, sebagai rahmat untuk seluruh Islam dan sebagai tumpuan harapan pemberi cahaya syari'at di akhirat kelak.

Penulisan skripsi ini adalah untuk melengkapi syarat-syarat dan tugas untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Program Studi Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar. Penyusunan skripsi ini dapat penulis susun dan selesaikan berkat do'a, bantuan serta dorongan dari berbagai pihak. Tanpa do'a, bantuan dan dorongan tersebut skripsi ini tidak akan bisa terwujud. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada Kedua orang tua penulis tersayang. Ayah Adris dan Ibu Etiyarnis serta kepada kakak Fadly Aresta dan Rifky yang telah menjadi keluarga terhebat. Terimakasih yang tiada terhingga atas limpahan kasih sayang dan cinta yang tulus, doa yang tiada pernah putus, materi, nasehat, perhatian, dan pengorbanan yang diberikan selalu membuat penulis bersyukur telah memiliki keluarga yang luar biasa, yang selalu menjadi motivasi terbesar penulis menyelesaikan skripsi ini.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapat bantuan, motivasi serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Delmus Purneri Salim, S.Ag M.A., M.Res. Ph.D Rektor UIN Mahmud Yunus Batusangkar.
2. Dr. H. Rizal, M.Ag. CRP selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Mahmud Yunus Batusangkar.

3. Dr. Novia Nengsih, M.A.Ek selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah yang telah memberikan arahan dan masukan kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini serta telah meluangkan waktu.
4. Dr. Nil Firdaus, M.A selaku Bapak Dosen Pembimbing yang sangat luar biasa dan berjasa dalam penulisan skripsi ini dalam memberikan ide, saran, arahan, dan motivasi yang luar biasa, ditengah kesibukan beliau dengan penuh kesabaran dan ketelitian dalam membimbing penulis dalam proses menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Prof. Dr. H. Syukri Iska, M.Ag dan Rahmat Firdaus , M.E.Sy selaku Dosen Penguji telah memberikan saran dan arahan demi kesempurnaan skripsi ini.
6. Bapak dan ibu Dosen, Karyawan dan Karyawati UIN Mahmud Yunus Batusangkar yang telah membantu, berbagi ilmu serta memberikan kemudahan kepada penulis selama masa perkuliahan dan proses penyelesaian skripsi ini.
7. Sahabat-sahabatku terimakasih segala dukungan, semangat, masukkan, serta bantuan selama di bangku perkuliahan hingga sampai penulisan skripsi ini.
8. Seluruh keluarga besar Program Studi Ekonomi Syariah dan seluruh teman-teman yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah membantu, dan memberi motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan masa perkuliahan.

Akhirnya, kepada Allah penulis berserah diri, semoga bantuan, motivasi dan bimbingan serta nasehat dari berbagai pihak menjadi amal ibadah yang ikhlas hendaknya, dan dibalas oleh Allah Swt. dengan balasan yang berlipat ganda. Semoga skripsi ini dapat memberi manfaat kepada kita semua, *Amin*.

Batusangkar, Agustus 2025  
Penulis

**Aditya M Rizky**  
**NIM. 2130402003**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN</b>	
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING</b>	
<b>PENGESAHAN TIM PENGUJI</b>	
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Identifikasi Masalah .....	9
C. Batasan Masalah.....	10
D. Rumusan Masalah.....	10
E. Tujuan Penelitian .....	10
F. Manfaat dan Luaran Penelitian.....	11
G. Defenisi Operasional .....	11
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>13</b>
A. Landasan Teori.....	13
1. Pendapatan Asli Daerah .....	13
2. Produk Domestik Regioanl Bruto (PDRB).....	30
3. Jumlah Penduduk.....	40
4. Hubungan Antar Variabel.....	48
B. Kajian Penelitian Yang Relevan .....	51
C. Kerangka Berfikir .....	53
D. Hipotesis .....	53
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>55</b>
A. Jenis Penelitian .....	55

B. Tempat dan Waktu Penelitian .....	55
C. Sumber Data .....	56
D. Teknik Pengumpulan Data.....	56
E. Teknik Analisis Data.....	56
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>61</b>
A. Gambar Umum Objek Penelitian .....	61
1. Kondisis Geografis Sumatera Barat.....	61
2. Jumlah Penduduk Sumatera Barat .....	62
B. Deskripsi Data .....	63
C. Hasil Analisis Data .....	66
D. Pembahasan .....	74
1. Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Sumatera Barat .....	74
2. Pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Sumatera Barat .....	76
3. Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto dan Jumlah Penduduk (PAD) di Provinsi Sumatera Barat.....	77
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>79</b>
A. Kesimpulan.....	79
B. Saran.....	80
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Data PDRB dan PAD .....	5
Tabel 1. 2 Data jumlah penduduk dan PAD .....	8
Tabel 3. 1 Waktu dan Tempat Penelitian .....	55
Tabel 4. 1 Nama-nama Kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat dan Jumlah penduduk .....	63
Tabel 4. 2 Data penelitian.....	64
Tabel 4. 3 Data penelitian sesudah di transformasi.....	65
Tabel 4. 4 Uji Normalitas .....	66
Tabel 4. 5 Uji Multikolinieritas .....	67
Tabel 4. 6 Uji Heteroskedastisitas .....	68
Tabel 4. 7 Uji Autokorelasi .....	68
Tabel 4. 8 Uji Regresi Linear Berganda .....	69
Tabel 4. 9 Uji Koefisien Determinan .....	71
Tabel 4. 10 Uji Parsial .....	72
Tabel 4. 11 Uji Simultan .....	73

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Berfikir.....	53
Gambar 4. 1 Peta Sumatera Barat .....	61

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia berupaya mengatasi permasalahan pembangunan yang harus dilakukan pemerintah bersama DPR terus berusaha menyusun kebijakan nasional untuk mendukung keberhasilan pembangunan daerah yang merupakan tolak ukur keberhasilan pembangunan secara keseluruhan. Untuk mendukung keberhasilan pembangunan daerah diberlakukan otonomi daerah melalui undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah. Undang-undang ini telah beberapa kali mengalami perubahan dan terakhir kali dengan UU No.12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas UU No.32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Tujuan yang hendak di capai dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah menghadirkan kemandirian daerah. Untuk mencapai kemandirian daerah, peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) menjadi salah satu instrument fiskal yang tidak dapat di hindari dalam pembangunan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di daerah (Alhusain, 2017)

Adapun pokok-pokok otonomi daerah antara lain: 1) konsep otonomi daerah berkaitan dengan cara pembagian secara vertikal kekuasaan pemerintah, 2) dasar kerakyatan dalam desentralisasi adalah hak rakyat di daerah untuk menentukan nasibnya sendiri dan mengatur pemerintahan sendiri, 3) sistem pelayanan publik yang efektif dan efisien adalah prinsip dasar dari desentralisasi, 4) pemerintahan yang sinergi dengan prinsip good governance adalah pemerintahan daerah yang berkarakter terbuka, kerakyatan, akuntabel dan partisipatif (Tjandra, 2004).

PAD merupakan pendapatan yang harus di peroleh dari penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, laba perusahaan daerah, dan lain-lain yang sah. PAD sebagai sumber pembiayaan pemerintah daerah dapat di hasilkan melalui beberapa sumber penerimaan terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya

yang di pisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah (Fauzan, 2006).

Menurut badan pusat statistik Pendapatan Asli daerah (PAD) pada tahun 2023 mengalami penurunan yaitu 2.783 juta rupiah dimana dibandingkan pada tahun sebelumnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami kenaikan yaitu 2.851 juta rupiah. Hal ini menjadi permasalahan yang harus diketahui (Badan Pusat Statistik, 2023).

Selain itu, PAD adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pajak daerah merupakan sumber PAD yang sangat potensial dalam penyumbang sisi penerimaan daerah. Defenisi pajak daerah sendiri adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepala daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah (Mardiasmo, 2008).

Retribusi daerah adalah salah satu PAD yang diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan meratakan kesejahteraan masyarakat, daerah kabupaten/kota diberi peluang dalam menggali potensi sumber-sumber keuangannya dengan menetapkan jenis distribusi selain yang telah di tetapkan, sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi msyarakat (Mardiasmo, 2008).

Salah satu faktor yang memengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB merupakan indikator yang menggambarkan kondisi perekonomian daerah secara menyeluruh. Perekonomian suatu wilayah dapat diartikan sebagai peningkatan pendapatan masyarakat secara agregat yang tercermin dari kenaikan total nilai tambah (*added value*) hasil kegiatan produksi barang dan jasa di wilayah tersebut. Perhitungan PDRB umumnya menggunakan harga

berlaku untuk menggambarkan nilai ekonomi pada tahun berjalan, namun untuk memperoleh gambaran pertumbuhan ekonomi riil dari tahun ke tahun digunakan harga konstan, yaitu perhitungan yang mengacu pada harga pada tahun dasar tertentu sehingga tidak terpengaruh oleh inflasi

PDRB Konstan akan memberikan dampak langsung pada perolehan pendapatan pemerintah, karena salah satunya peningkatan tarif pajak yang telah ditentukan oleh pemerintah daerah untuk kalangan pengusaha, seperti halnya teori Peacock dan Wisemen menjelaskan bahwa perkembangan ekonomi menyebabkan berbagai pemungutan pajak dan meningkatkannya penerimaan pajak menyebabkan pengeluaran pemerintah juga semakin meningkat. Maksudnya ketika ekonomi berkembang (ditunjukkan oleh PDRB yang tinggi), berarti lebih banyak barang dan jasa diproduksi di suatu daerah. Contohnya, pabrik-pabrik memproduksi lebih banyak, sektor pertanian menghasilkan panen melimpah, dan sektor jasa tumbuh pesat Produksi yang lebih tinggi berarti ada lebih banyak yang bisa dikenai pajak. Misalnya, Pajak Barang dan Jasa Tertentu (seperti Pajak Restoran, Pajak Hotel). Seiring dengan peningkatan produksi diikuti oleh peningkatan pendapatan Masyarakat, Semakin tinggi pendapatan seseorang maka akan semakin besar pula kemampuan masyarakat daerah tersebut untuk membiayai pajak dan retribusi yang ditarik daerah pemerintah. (Peacock, 1961).

Hal yang sama dijelaskan teori pertumbuhan neo klasik yang dikemukakan oleh Abramovitas dan Solow menyatakan bahwa perkembangan faktor-faktor produksi menjadi salah satu faktor yang dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat dilihat dari pertumbuhan PDRB disuatu daerah, tingginya pertumbuhan PDRB suatu daerah dapat menciptakan masyarakat yang produktif karena terjadi peningkatan pendapatan dan banyaknya variasi produk dan jasa yang diproduksi disuatu daerah sehingga dapat meningkatkan konsumsi masyarakat daerah. Ada Tujuh belas sektor yang termasuk dalam PDRB merupakan objek pajak yang dapat meningkatkan pendapatan asli daerah seperti sektor perhotelan dapat berkontribusi pada PAD melalui pajak hotel,

pajak parkir, pajak hiburan dan pajak restoran. Kemudian ada sektor manufaktur atau industri melalui pajak penerangan jalan, pajak air tanah, PBB, dan sebagainya yang didasarkan oleh peraturan pemerintah. Di sisi lain, tingginya penerimaan pajak dapat mendorong suatu negara untuk meningkatkan pengeluaran pemerintah, yang memiliki potensi untuk merangsang aktivitas ekonomi dan pada akhirnya menyebabkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. (Todaro, 1998)

Dalam perspektif Teori Permintaan Agregat yang dikemukakan oleh John Maynard Keynes, peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mencerminkan adanya kenaikan output dan pendapatan masyarakat di suatu daerah. Kenaikan pendapatan ini akan meningkatkan daya beli masyarakat, yang selanjutnya mendorong permintaan terhadap barang dan jasa di berbagai sektor perekonomian. Peningkatan permintaan tersebut akan memacu pertumbuhan sektor-sektor usaha seperti perdagangan, jasa, pariwisata, dan industri, yang pada gilirannya memperluas basis pajak daerah. Dengan semakin banyaknya objek pajak dan retribusi yang dapat dipungut, seperti pajak restoran, pajak hotel, pajak hiburan, pajak parkir, pajak penerangan jalan, dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), maka penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan meningkat. Oleh karena itu, sesuai dengan teori ini, peningkatan PDRB berpengaruh positif terhadap PAD karena melalui kenaikan permintaan agregat, aktivitas ekonomi daerah tumbuh dan menghasilkan sumber penerimaan pajak yang lebih besar bagi pemerintah daerah

Ditinjau dari penelitian yang dilakukan oleh (Asmuruf et al., 2015) produk domestik regional bruto tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah sama dengan penelitian yang dilakukan oleh (Juwita & Widia, 2022) Di sisi lain terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh (Azmindia & Hailuddin, 2024) dan (Winda Naraswari et al., 2024) produk domestik regional bruto berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah.

Berikut adalah data perkembangan Produk Domestik Regional Bruto dan Pendapatan Asli Daerah di Sumatera Barat tahun 2008 hingga 2023

**Tabel 1. 1**  
**Data PDRB dan PAD**

<b>Tahun</b>	<b>PDRB (Rupiah)</b>	<b>PAD (Rupiah)</b>
2008	95.222.959,02	790.087.767.747
2009	99.449.726,82	739.747.093
2010	105.017.739,45	1.006.820.947.269
2011	111.679.492,97	1.147.303.770.000
2012	118.724.424,67	1.225.466.022.712
2013	125.940.634,27	1.366.178.102.000
2014	133.340.836,44	1.729.222.284
2015	140.719.474,19	1.876.733.122
2016	148.134.243,89	1.964.148.975
2017	155.984.364,13	2.275.090.068
2018	163.996.189,04	2.134.010.519
2019	169.426.614,10	2.328.432.873
2020	172.205.571,30	2.255.072.985
2021	174.999.891,95	2.551.899.163
2022	182.629.142,51	2.851.966.014
2023	191.071.350,94	2.783.511.043

Berdasarkan tabel 1.1 Secara teori peningkatan produk domestik regional bruto seharusnya meningkatkan pendapatan asli daerah, karena produk domestik regional bruto yang tinggi menunjukkan banyaknya aktifitas ekonomi yang bisa dikenai pajak yang berpengaruh langsung terhadap pendapatan asli daerah. Data menunjukkan bahwa pada tahun 2009 dan 2014, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mengalami kenaikan, namun Pendapatan Asli Daerah (PAD) justru mengalami penurunan. Fenomena serupa juga terjadi pada tahun 2018, 2020, dan 2023, di mana peningkatan PDRB tidak diiringi oleh peningkatan PAD, hal ini bertentangan dengan teori yang menyatakan bahwa naiknya produk domestik regional bruto akan menyebabkan naiknya pendapatan asli daerah. Ketidaksesuaian ini

menunjukkan bahwa produk domestik regional bruto dan pendapatan asli daerah tidak selalu linear

Kemudian faktor yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah adalah jumlah penduduk, adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap, baik yang produktif atau tidak produktif. Penduduk yang produktif merupakan harapan dari pemerintah daerah, semakin penduduk produktif maka semakin besar kesempatan kerja yang tercipta, selain itu juga jumlah penduduk kota yang diimbangi dengan SDM yang telah terdidik akan membantu membangun pemerintah daerah. Oleh karena itu penduduk sangat menentukan perekonomian di pemerintah, baik pemerintah daerah atau pemerintah pusat. Jadi penduduk diharapkan, tetapi diimbangi dengan kesempatan kerja serta perekonomian baru yang kemudian pada jangka panjang akan lebih mengarah pada pembangunan pemerintah.

Pada teori ekonomi publik tentang Pajak sendiri pada Peacock dan Wiseman menjelaskan, jumlah masyarakat mempunyai suatu tingkat toleransi pajak, dan suatu tingkat pajak dimana masyarakat dapat memahami besarnya pungutan pajak yang dibutuhkan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah. Adapun Hukum Wagner mengutarakan bahwa, dalam suatu perekonomian di dalam masyarakat, apabila jumlah pendapatan perkapita meningkat, secara relatif pengeluaran pemerintahpun akan meningkat karena disebabkan adanya penerimaan pendapatan yang melalui pajak dan retribusi didalam kegiatan ekonomi (Peacock, 1961).

Selain itu penduduk akan mempengaruhi pemerintah daerah yang menjelaskan, apabila kemajuan teknologi terjadi lebih cepat pada daerah dengan banyak jumlah penduduk sehingga ada lebih banyak temuan, maka daerah dengan banyak jumlah penduduk akan peningkatan pendapatan di dalam pemerintah daerah atau perkembangan yang lebih cepat (Mankiw, 2007).

Menurut teori Adam Adam Smith menjelaskan hubungan antara jumlah penduduk dan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ketika jumlah penduduk meningkat, potensi PAD juga berpotensi untuk meningkat. Ini karena penduduk, dalam kapasitasnya sebagai produsen, akan menjadi motor penggerak ekonomi daerah. Ketika ada lebih banyak penduduk, ada lebih banyak individu yang potensial untuk terlibat dalam kegiatan produksi, baik itu di sektor pertanian, industri manufaktur, jasa, maupun perdagangan. Semakin banyak produksi barang dan jasa semakin besar pula aktivitas ekonomi yang terjadi di daerah tersebut yang bisa di kenai pajak yang mana akan meningkatkan pendapatan asli daerah (Todaro, 1998). Dalam penelitian (Priyono & Handayani, 2021) teori ini membawa pengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah.

Dalam teori Revered Thomas Maltus menjelaskan Penduduk dapat mempengaruhi penerimaan pendapatan daerah. Dengan meningkatnya jumlah penduduk akan meningkatkan permintaan terhadap barang dan jasa yang di butuhkan. Hal ini selanjutnya dapat mendorong peningkatan produksi sehingga akan mengakibatkan adanya perluasan usaha dan pendirian usaha baru pada sektor produksi. Pendirian usaha baru akan menambah angkatan kerja yang bekerja sehingga pendapatan masyarakat akan cenderung meningkat. Dengan meningkatnya pendapatan masyarakat maka kemampuan untuk membayar pajak dan retribusi juga meningkat yang akan membawa pengaruh terhadap pendapatan asli daerah. (Sukirno, 2003)

Teori Desentralisasi Fiskal menurut Wallace E. Oates dan Richard Musgrave menyatakan bahwa pemerintah daerah memiliki hak untuk mengatur dan mengelola pendapatan sendiri sesuai potensi wilayahnya, terutama melalui pemungutan pajak daerah dan retribusi. Jumlah penduduk menjadi salah satu faktor penting karena setiap orang berpotensi membayar pajak atau menggunakan layanan publik yang dikenai retribusi. Jika jumlah penduduk bertambah, maka jumlah pembayar pajak juga akan meningkat, seperti pemilik kendaraan yang membayar pajak kendaraan bermotor, pemilik rumah yang membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), serta konsumen

yang membayar pajak restoran, hotel, hiburan, atau parkir. Semakin banyak penduduk, semakin besar pula potensi pemerintah daerah untuk memperoleh Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang selanjutnya dapat digunakan untuk pembangunan dan pelayanan masyarakat

Berbeda dengan penelitian yang di lakukan oleh (Saldi et al., 2021) jumlah penduduk tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Disisi lain penelitian yang dilakukan oleh (Asmuruf et al., 2015) jumlah penduduk berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah. Sebaliknya penelitian yang dilakukan (Rachman & Restiatun, 2023) jumlah penduduk berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Berikut data perkembangan jumlah penduduk dan Pendapatan Asli Daerah di Sumatera Barat tahun 2008-2023

**Tabel 1. 2**  
**Data jumlah penduduk dan PAD**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Penduduk (Jiwa)</b>	<b>PAD (Rupiah)</b>
2008	4.801.852	790.087.767.747
2009	4.869.620	739.747.093
2010	4.865.331	1.006.820.947.269
2011	4.933.112	1.147.303.770.000
2012	5.000.184	1.225.466.022.712
2013	5.066.476	1.366.178.102.000
2014	5.131.882	1.729.222.284
2015	5.196.289	1.876.733.122
2016	5.259.528	1.964.148.975
2017	5.221.489	2.275.090.068
2018	5.382.077	2.134.010.519
2019	5.441.197	2.328.432.873
2020	5.534.472	2.255.072.985
2021	5.580.232	2.551.899.163
2022	5.640.629	2.851.966.014
2023	5.700.573	2.783.511.043

Berdasarkan tabel 1.2 Secara teori peningkatan jumlah penduduk seharusnya meningkatkan pendapatan asli daerah, karena dengan

meningkatnya jumlah penduduk akan meningkatkan permintaan terhadap barang dan jasa yang di butuhkan yang akan memicu aktifitas ekonomi yang akan berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Data menunjukkan bahwa pada tahun 2009 dan 2014, jumlah penduduk mengalami kenaikan, namun Pendapatan Asli Daerah (PAD) justru mengalami penurunan. Fenomena serupa juga terjadi pada tahun 2018, 2020, dan 2023, di mana kenaikan jumlah penduduk tidak diiringi oleh peningkatan PAD, bahkan cenderung mengalami penurunan.. Hal ini bertentangan dengan teori yang menyatakan bahwa kenaikan jumlah akan meningkatkan pendapatan asli daerah. Ketidaksesuaian ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk dan pendapatan asli daerah tidak selalu linear

Sesuai uraian latar belakang diatas, apakah benar berpengaruh atau tidak produk domestik regional bruto dan jumlah penduduk terhadap pendapatan asli daerah di Sumatera Barat. maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang produk domestik regional bruto jumlah penduduk dan pendapatan asli daerah. Untuk itu penulis menulis judul **“Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto dan Jumlah Penduduk Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Provinsi Sumatera Barat ”**.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas maka dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut:

1. Terjadinya penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di provinsi sumatera barat pada tahun 2009 sedangkan pada tahun 2008 mengalami kenaikan.
2. Naiknya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tidak selalu diiringi dengan naiknya Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Sumatera Barat
3. Naiknya jumlah penduduk tidak selalu diiringi dengan naiknya Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Sumatera Barat
4. Naiknya nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Jumlah penduduk secara bersamaan tidak selalu diiringi dengan naiknya Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Sumatera Barat

### **C. Batasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah dipaparkan sebagai berikut:

1. Naiknya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tidak selalu diiringi dengan naiknya Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Sumatera Barat
2. Naiknya jumlah penduduk tidak selalu diiringi dengan naiknya Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Sumatera Barat
3. Naiknya nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Jumlah Penduduk secara bersamaan tidak selalu diiringi dengan naiknya Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Sumatera Barat

### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pembatasan masalah diatas, maka dapat dikemukakan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah berpengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Sumatera Barat?
2. Apakah berpengaruh jumlah penduduk terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Sumatera Barat?
3. Apakah berpengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan jumlah penduduk terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Sumatera Barat?

### **E. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang ada diatas maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Sumatera Barat.
2. Untuk mengetahui pengaruh jumlah penduduk terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Sumatera Barat.

3. Untuk mengetahui pengaruh Produk Domestik Regional Bruto dan jumlah penduduk terhadap pendapatan Asli daerah (PAD) di Provinsi Sumatera Barat

## **F. Manfaat dan Luaran Penelitian**

### 1. Manfaat Penelitian

#### a. Manfaat Teoritis

Melalui penelitian yang dilakukan berguna untuk mengetahui dan mendalami pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Jumlah Penduduk dan Inflasi terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Sumatera Barat

#### b. Manfaat Praktis

##### 1) Bagi peneliti

Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana Ekonomi pada jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar.

##### 2) Bagi perguruan tinggi

Diharapkan menjadi bahan kajian bagi penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan pengaruh PDRB, Jumlah Penduduk dan inflasi terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Sumatera Barat

### 2. Luaran Penelitian

Adapun penelitian yang diharapkan dari penelitian ini adalah agar hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi pustaka UIN Mahmud Yunus Batusangkar dan dapat diterbitkan pada jurnal ilmiah.

## **G. Defenisi Operasional**

**Pendapatan Asli Daerah** adalah suatu pendapatan yang menunjukkan suatu daerah untuk memungut dana untuk membiayai berjalanya kegiatan dalam suatu daerah (Zumardi & Sanica, 2020). Pendapatan asli daerah salah satu komponen dalam pembangunan ekonomi, jika pendapatan asli daerah meningkat maka dapat pula mempengaruhi produksi nasional. PAD merupakan pendapatan yang harus di peroleh dari penerimaan pajak daerah,

retribusi daerah, laba perusahaan daerah, dan lain-lain yang sah. PAD sebagai sumber pembiayaan pemerintah daerah, PAD dapat di hasilkan melalui beberapa sumber penerimaan terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang di pisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah,

**Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)** adalah nilai barang dan jasa yang dibuat dalam negeri tanpa membedakan warga negara pada waktu tertentu. Pendapatan warga negara Indonesia (WNI) yang bekerja di luar negeri tidak dimasukan ke dalam PDB. Sebanding dengan PDB warga negara asing (WNA) dan (WNI) yang tinggal di Indonesia tetapi tidak termasuk WNI yang bekerja di luar negeri (Sayifullah & Emmalian, 2018). berpendapat bahwa PDRB adalah Jumlah nilai tambah yang dihasilkan dari berbagai kegiatan perekonomian di suatu wilayah, tanpa memandang kepemilikan faktor-faktor produksi, baik milik penduduk wilayah tersebut maupun penduduk wilayah lain,

**Jumlah Penduduk** adalah jumlah seluruh penduduk yang pernah mendiami wilayah geografis suatu negara selama jangka waktu tertentu dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan pemerintah. Jumlah penduduk adalah setiap individu yang telah menetap di wilayah geografis republik Indonesia selama enam bulan atau lebih dengan tujuan menetap dan Said (2012) berpendapat bahwa penduduk sebagai jumlah orang yang bertempat tinggal di suatu wilayah pada waktu tertentu dan merupakan hasil dari proses demografi yaitu fertilitas mortalitas dan migrasi (Hilmi et al., 2024).

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Landasan Teori**

##### **1. Pendapatan Asli Daerah**

###### **a. Pengertian**

Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang berasal dari pajak daerah, bagi hasil, perusahaan daerah, pendapatan instansi pemerintah dan pendapatan lainnya yang murni menjadi pendapatan daerah (Purwanti & Dewi, 2014).

Pendapatan asli daerah (PAD) menurut Mardiasmo adalah penghasilan yang didapat dari pajak industri daerah, pajak daerah, hasil badan usaha milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah sendiri dan sumber penghasilan lain yang sah (Ramadhan, 2019).

Pendapatan asli daerah adalah penerimaan daerah dari beragam jenis usaha pemerintah daerah guna mendapatkan modal bagi kebutuhan daerah yang berkaitan guna mendanai operasional rutin dan pembangunannya. Pendapatan ini terbentuk dari pajak daerah, retribusi daerah, keuntungan perusahaan daerah, dan lain-lain. PAD disebut pendapatan daerah yang bergantung pada perilaku perekonomian secara umum dan kemungkinan sumber-sumber pendapatan asli daerah itu sendiri. Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang menunjukkan kemampuan daerah dalam memperoleh modal guna mendanai kegiatan daerah. Konsep pendapatan asli daerah dengan demikian diperoleh gambaran sebagai pendapatan reguler dari upaya daerah dalam menggunakan potensi sumber keuangan untuk membiayai tugas dan tanggung jawab mereka.

Pendapatan asli daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh dari sumber-sumber pendapatan daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan dikelola sendiri oleh pemerintah daerah, yang bertujuan

untuk memberi keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan untuk pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah menyebutkan Pasal 1 bahwa PAD adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pada Pasal 3 UU No. 33 Tahun 2004, PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi Daerah sebagai perwujudan Desentralisasi. PAD bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah (Ambya, 2023).

#### **b. Faktor yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah**

Pendapatan asli daerah (PAD) adalah pendapatan daerah yang berasal dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan sumber lain dari pendapatan asli daerah yang sah. Tujuan PAD adalah untuk memberikan kemampuan kepada daerah untuk menggali sumber daya ketika mereka menerapkan otonomi mereka sebagai hasil dari desentralisasi. Menurut teori peacock dan wiseman yang dikenal sebagai teori pengeluaran publik, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pendapatan asli daerah seperti pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, lain pendapatan asli daerah PDRB dan jumlah penduduk (Peacock, 1961). Begitu juga pada penelitian (Prasetyo et al., 2022).

##### **1) Pajak daerah**

Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Pajak Daerah menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 adalah kontribusi wajib pajak kepada daerah yang berurutan oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak memberikan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Mardiasmo berpendapat bahwa” Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah (Mardiasmo, 2011).

Menurut Prof. Dr. Mardiasmo, MBA, Ak, dalam bukunya Perpajakan Edisi Revisi (2011), Pajak adalah iuran rakyat kepada negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Definisi Pajak itu sendiri menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Naibaho et al., 2021).

Dari pengertian pajak diatas dapat disimpulkan bahwa ada 5 (lima) unsur yang melekat dalam pengertian pajak yaitu:

- a) Pembayaran pajak harus berdasarkan undang undang
- b) Sifatnya dapat dipaksakan
- c) Tidak ada kontra-prestasi (imbalan) yang berlangsung dapat dirasakan oleh pembayar pajak
- d) Pemungut pajak dapat dilakukakn oleh negara baik oleh pemerintah pusat maupun daerah ( tidak dipngut oleh swasta)
- e) Pajak digunakan untuk membiayai berbagai pengeluaran pemerintah

## 2) Retribusi Daerah

Retribusi daerah pada umumnya merupakan sumber pendapatan penyumbang Pendapatan Asli Daerah kedua setelah pajak daerah, bahkan untuk beberapa daerah penerimaan retribusi daerah ini lebih tinggi daripada pajak daerah. Dalam istilah asing retribusi disebut sebagai *user charge*, *user face*, atau *charging for service*. Retribusi daerah memiliki karakteristik yang berbeda dengan pajak daerah. Retribusi daerah merupakan pungutan yang dilakukan pemerintah daerah kepada wajibretribusi atas pemanfaatan suatu jasaRetribusi daerah (Azhar, 2021).

Menurut Undang-Undang No 28 Tahun 2009, adalah pungutan daerah yang diberikan oleh pemerintah daerah sebagai pembayaran atas jasa atau izin khusus yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan individu atau badan. Hasil retribusi daerah adalah pungutan daerah yang telah secara sah menjadi pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik pemerintah daerah yang bersangkutan.

Retribusi juga menjadi salah satu sumber pendapatan bagi setiap daerah. Menurut UU no 28 tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah disebutkan bahwa retribusi daerah adalah oungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Berbeda dengan pajak pusat seperti pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai yang dikelola oleh direktorat jendral pajak, retribusi yang dapat disebut sebagai pajak daerah dikelola oleh dinas pendapatan daerah

Beberapa ciri yang melekat pada retribusi adalah sebagai berikut (Suharyadi et al., 2018) :

- a) Retribusi merupakan pungutan yang dipungut berdasarkan undang undang dan peraturan daerah yang berkenan

- b) Hasil penerimaan retribusi masuk ke kas pemerintah daerah
- c) Pihak yang membayar retribusi mendapatkan kontra prestasi (balas jasa) secara langsung dari pemerintah daerah atas pembayaran yang dilakukannya
- d) Retribusi terutang apabila ada jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang dinikmati oleh orang atau badan.
- e) Sanksi yang dikenakan pada retribusi adalah sanksi secara ekonomis, yaitu jika tidak membayar retribusi tidak akan memperoleh jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.

Menurut UU Nomor 28 tahun 2009 secara keseluruhan terdapat jenis retribusi yang dapat dipungut oleh daerah yang di kelompokkan ke dalam 3 golongan retribusi, yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu. Retribusi daerah dibagi tiga golongan yaitu:

- a) Retribusi jasa umum yang merupakan pungutan yang dikenakan oleh daerah kepada masyarakat atas pelayanan yang diberikan, diantaranya adalah pajak hotel, pajak restoran, retribusi objek wisata
- b) Retribusi jasa usaha, yang merupakan pungutan yang dikenakan oleh daerah berkaitan dengan penyediaan layanan yang belum memadai disediakan oleh swasta atau penyewaan aset/kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan.
- c) Retribusi perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, sarana, prasarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum, dan menjaga kelestarian lingkungan. Perizinan tersebut termasuk kewenangan pemerintah yang diserahkan kepada daerah dalam

rangka asas desentralisasi (pasal 18 ayat 2 UU No.34 Tahun 2000).

### 3) Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Angka (3) yang dimaksud dengan “hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan” antara lain bagian laba dari BUMD, hasil kerjasama dengan pihak ketiga. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan yaitu Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan. Jenis-jenis Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan meliputi objek pendapatan, yaitu bagian laba perusahaan milik daerah, bagian laba lembaga keuangan bank, bagian laba lembaga bukan keuangan bank dan bagian laba penyertaan modal (Halim, 2008).

Menurut UU No. 33 Tahun 2004 menjelaskan tentang Pendapatan asli Daerah yang sah, disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Halim (2004) menyebutkan jenis pendapatan ini meliputi objek pendapatan berikut:

- a) Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
  - b) Penerimaan Jasa Giro
  - c) Pendapatan Bunga
  - d) Denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan
  - e) Penerimaan ganti rugi atas kerugian/kehilangan kekayaan daerah
- 4) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan bahwa lain-lain

pendapatan daerah yang sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain PAD dan dana perimbangan, yang meliputi hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan, penerimaan jasa giro, pendapatan bunga deposito, tuntutan ganti kerugian daerah dan komisi, potongan dan selisih nilai tukar rupiah (Yani, 2008)

Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah adalah dinas-dinas daerah serta pendapatan-pendapatan lainnya yang diperoleh secara sah oleh pemerintah daerah. penerimaan lain-lain sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam APBD yang mencakup berbagai jenis penerimaan dari hasil penjualan alat-alat dan bahan sisa, penerimaan dari sewa, bunga pinjaman bank dan giro, dan penerimaan denda yang dipikul oleh kontraktor

Hasil Pendapatan asli daerah yang sah merupakan hasil pendapatan yang diperoleh berdasarkan penerimaan yang diperoleh melalui hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan secara tunai atau angsuran/cicilan, jasa giro, pendapatan dari pengembalian, fasilitas sosial dan fasilitas umum dan dari asuransi kesehatan pegawai.

##### 5) Poduk Domestik Regional Bruto

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah ukuran penting untuk mengetahui kondisi perekonomian suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu. Menurut Pusat Statistik Sumatera, PDRB mencakup nilai total barang dan jasa akhir yang dibuat dalam aktivitas ekonomi di wilayah tersebut. PDRB Konstan akan memberikan dampak langsung pada perolehan pendapatan pemerintah, karena salah satunya peningkatan tarif pajak yang telah ditentukan oleh pemerintah daerah untuk kalangan pengusaha, seperti halnya teori Peacock dan Wisemen menjelaskan bahwa perkembangan ekonomi menyebabkan berbagai pemungutan pajak dan meningkatkannya penerimaan pajak menyebabkan pengeluaran pemerintah juga semakin meningkat.

Meningkatnya PDRB akan menambah penerimaan pemerintah dari pajak daerah. Selanjutnya dengan bertambahnya penerimaan pemerintah akan mendorong peningkatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat yang nantinya diharapkan dapat meningkatkan produktivitas masyarakat yang akhirnya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi kembali. Begitu juga sebaliknya dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita masyarakat, maka akan mendorong kemampuan masyarakat untuk membayar pajak dan pungutan lainnya (Peacock)

Teori pertumbuhan neo klasik yang dikemukakan oleh Abramovitas dan Solow menyatakan bahwa perkembangan faktor-faktor produksi menjadi salah satu faktor yang dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat dilihat dari pertumbuhan PDRB disuatu daerah, tingginya pertumbuhan PDRB suatu daerah dapat menciptakan masyarakat yang produktif karena terjadi peningkatan pendapatan dan banyaknya variasi produk dan jasa yang diproduksi disuatu daerah sehingga dapat meningkatkan konsumsi masyarakat daerah. Ada Tujuh belassektor yang termasuk dalam PDRB merupakan objek pajak yang dapat meningkatkan pendapatan asli daerah seperti sektor perhotelan dapat berkontribusi pada PAD melalui pajak hotel, pajak parkir, pajak hiburan dan pajak restoran. Kemudian ada sektor manufaktur atau industri melalui pajak penerangan jalan, pajak air tanah, PBB, dan sebagainya yang didasarkan oleh peraturan pemerintah. Di sisi lain, tingginya penerimaan pajak dapat mendorong suatu negara untuk meningkatkan pengeluaran pemerintah, yang memiliki potensi untuk merangsang aktivitas ekonomi dan pada akhirnya menyebabkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi

## 6) Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk terdiri dari semua orang yang telah tinggal di daerah tersebut selama enam bulan atau telah memilih untuk tinggal di sana. Dalam bukunya "kekayaan negeri" Smith menyatakan bahwa suatu bangsa adalah tenaga kerja yang produktif. Namun, pandangan Malthus dan Ricardo menunjukkan bahwa pertumbuhan populasi dapat berdampak positif pada perekonomian Negara.

Pada teori ekonomi publik tentang Pajak sendiri pada Peacock dan Wiseman merupakan, jumlah masyarakat mempunyai suatu tingkat toleransi pajak, dan suatu tingkat pajak dimana masyarakat dapat memahami besarnya pungutan pajak yang dibutuhkan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah.

Dalam teori Revered Thomas Maltus menjelaskan Penduduk dapat mempengaruhi penerimaan pendapatan daerah. Dengan meningkatnya jumlah penduduk akan meningkatkan permintaan terhadap barang-barang konsumsi. Hal ini selanjutnya dapat mendorong peningkatan produksi sehingga akan mengakibatkan adanya perluasan usaha dan pendirian usaha baru pada sektor produksi. Pendirian usaha baru akan menambah angkatan kerja yang bekerja sehingga pendapatan masyarakat akan cenderung meningkat. Dengan meningkatnya pendapatan masyarakat maka kemampuan untuk membayar pajak dan retribusi juga meningkat yang akan membawa pengaruh terhadap pendapatan asli daerah.

Menurut teori Adam Smith menjelaskan hubungan antara jumlah penduduk dan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ketika jumlah penduduk meningkat, potensi PAD juga berpotensi untuk meningkat. Ini karena penduduk, dalam kapasitasnya sebagai produsen, akan menjadi motor penggerak ekonomi daerah. Ketika ada lebih banyak penduduk, ada lebih banyak individu yang

potensial untuk terlibat dalam kegiatan produksi, baik itu di sektor pertanian, industri manufaktur, jasa, maupun perdagangan. Semakin banyak produksi barang dan jasa semakin besar pula aktivitas ekonomi yang terjadi di daerah tersebut yang bisa di kenai pajak yang mana akan meningkatkan pendapatan asli daerah (Todaro, 1998). Dalam penelitian (Priyono & Handayani, 2021) teori ini membawa pengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah.

### c. Pendapatan Asli Daerah dalam perspektif islam berdasarkan AL-Qur'an dan Hadis

#### 1) Surah Al-Baqarah (2): 267

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا اَخْرَجْنَا  
لَكُمْ مِّنَ الْاَرْضِ<sup>ط</sup>

Artinya: "*Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu...*" (QS. Al-Baqarah: 267)

Ayat ini mengajarkan agar harta yang diperoleh dari hasil usaha dan hasil bumi (termasuk sumber daya alam daerah) digunakan dengan cara yang baik (ṭayyib). Ini menunjukkan bahwa sumber Pendapatan Asli Daerah seperti pajak, retribusi daerah, dan hasil kekayaan alam (misalnya tambang, pertanian, pariwisata) harus dikelola dengan halal dan bersih dari unsur kezaliman, serta digunakan untuk kebaikan bersama. Dalam konteks ini, daerah memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan sumber Pendapatan Asli Daerah berasal dari usaha yang legal dan etis, serta digunakan untuk tujuan mulia seperti pembangunan dan pelayanan public

## 2) QS. Al-A'raf (7): 96

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ ءَامَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ  
وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿٩٦﴾

Artinya : *Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, Pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat kami) itu, Maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya.*

Ayat ini menunjukkan bahwa keberkahan dalam ekonomi termasuk PAD tidak hanya tergantung pada besar kecilnya potensi daerah, tetapi juga pada iman dan ketakwaan pengelolanya. Bila pengelolaan PAD dilakukan dengan kejujuran, akuntabilitas, dan sesuai dengan prinsip Islam, maka akan turun keberkahan — yakni manfaat yang meluas dan lestari bagi masyarakat. Ini mengajarkan bahwa PAD bukan hanya soal angka, tapi nilai spiritual dan etika dalam pengelolaannya.

## 3) Surah At-Taubah (9): 60

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ  
قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ  
فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Artinya: *"Sesungguhnya zakat itu hanya untuk orang-orang fakir, miskin, pengurus zakat, muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang yang berutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan." (QS. At-Taubah: 60)*

Walaupun ayat ini berbicara tentang zakat, prinsip distribusi ini bisa diterapkan dalam konteks penggunaan PAD, yaitu: PAD seharusnya digunakan terutama untuk kelompok masyarakat yang membutuhkan, seperti masyarakat miskin, pengangguran, dan

kelompok rentan lainnya. Penggunaan PAD sebaiknya diarahkan untuk pembangunan yang inklusif: fokus pada pelayanan dasar (pendidikan, kesehatan, infrastruktur desa, dll), bukan sekadar proyek mercusuar atau elit.

4) HR. Bukhari No. 2751

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

Artinya : *"Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya."* (HR. Bukhari No. 2751)

Makna dari hadis diatas adalah pengelola keuangan daerah (termasuk PAD) akan dimintai pertanggungjawaban atas amanah yang diemban, baik oleh rakyat maupun oleh Allah di akhirat.

5) HR. Tirmidzi No. 641

مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْتَرْعِيهِ اللَّهُ رَعِيَّةً، فَيَمُوتُ يَوْمَ يَمُوتُ وَهُوَ غَاشٌّ لِرَعِيَّتِهِ إِلَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ

Artinya : *"Tidaklah seorang hamba diberikan kekuasaan oleh Allah, kemudian ia meninggal dalam keadaan menipu rakyatnya, melainkan Allah haramkan surga baginya."* (HR. Tirmidzi No. 641)

Makna dari hadis diatas adalah pemimpin yang menyalahgunakan keuangan publik seperti pendapatan asli daerah untuk kepentingan pribadi akan mendapat belasan berat bahkan terhalang masuk surga

#### **d. Sumber Pendapatan Asli Daerah dalam Perspektif Ekonomi Islam**

Dalam perspektif ekonomi Islam, pendapatan daerah atau negara dapat diklasifikasikan ke dalam dua kategori, yaitu pendapatan tetap dan pendapatan tidak tetap. Pendapatan tidak tetap mencakup ghanimah (harta rampasan perang) dan sedekah, yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus oleh syariat, seperti untuk bantuan sosial atau kesejahteraan kelompok tertentu. Sementara itu, pendapatan tetap meliputi fay'I, jizyah, kharaj, 'ushr, dan bea cukai. Jenis-jenis pendapatan ini dikelola oleh negara atau pemerintah daerah dan

digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan publik, seperti keamanan, transportasi, pendidikan, serta infrastruktur sosial lainnya.

Adapun beberapa sumber Pendapatan Asli Daerah dalam Islam akan dijelaskan sebagai berikut:

#### 1) Fay'i

Fay'i adalah harta yang diperoleh dari musuh tanpa melalui peperangan, misalnya karena penyerahan sukarela atau perjanjian damai. Dalam hukum Islam, fay'i termasuk sumber pendapatan yang sepenuhnya menjadi milik negara, sehingga pemerintah memiliki hak penuh untuk mengelola dan menggunakannya. Harta tersebut digunakan untuk kepentingan masyarakat umum, seperti pembangunan fasilitas umum, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan sosial lainnya (Gusfahmi, 2001).

#### 2) Jizyah

*Jizyah* merupakan kewajiban finansial yang dibebankan kepada penduduk non-Muslim yang tinggal di wilayah negara Islam. Pembayaran ini menjadi imbalan atas perlindungan negara terhadap jiwa, harta, dan kebebasan mereka dalam menjalankan agama. Dengan demikian, pungutan jizyah bersifat kompensasi, bukan pemaksaan keyakinan. Dasar hukumnya terdapat dalam Al-Qur'an, yaitu Surah At-Taubah ayat 29

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا


الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴿٢٩﴾

Artinya : “Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir, tidak mengharamkan (menjauhi) apa yang telah diharamkan (oleh) Allah dan Rasul-Nya, dan tidak mengikuti agama yang hak (Islam), yaitu orang-orang yang telah diberikan Kitab (Yahudi dan Nasrani) hingga mereka membayar jizyah dengan patuh dan mereka tunduk”.

Jizyah dikenakan atas diri sendiri setiap orang kafir, bukan atas harga mereka. Jizyah juga tidak gugur dari mereka, sekalipun mereka ikut terlibat dalam perang. Jizyah merupakan harta umum yang akan dibagikan untuk kemaslahatan bagi seluruh rakyat dan wajib diambil setelah melewati satu tahun, serta tidak wajib sebelum satu tahun. Jizyah termasuk fay' yang didistribusikan untuk kepentingan kaum muslimin seluruhnya, baik yang ikut berperang maupun yang tidak

### 3) Kharaj

Kharaj adalah jenis pajak yang dikenakan atas tanah atau hasil pertanian, terutama dari wilayah yang telah ditaklukkan oleh negara Islam. Pajak ini dibayarkan oleh pemilik tanah, baik Muslim maupun non-Muslim, sebagai bentuk kontribusi kepada negara. Ketentuan mengenai prinsip pemungutan ini juga tersirat dalam firman Allah SWT dalam Surah Al-Mu'minun ayat 72


 أَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجًا فَخَرَاجُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَهُوَ خَيْرُ الرَّزَاقِينَ

Artinya : *“Ataukah engkau (Nabi Muhammad) meminta imbalan kepada mereka, sedangkan imbalan dari Tuhanmu lebih baik karena Dia sebaik-baik pemberi rezeki?”*

Kharaj dikenakan atas orang kafir dan juga muslim dan kharaj dikenakan pada tanah (pajak tetap) dan hasil tanah (pajak proposional) yang terutama ditaklukkan oleh kekuatan senjata terlepas dari seseorang tersebut muslim ataupun non muslim. Hasil pengenaan kharaj didistribusikan untuk kepentingan seluruh kaum muslim di setiap masa.

### 4) Ushr

Di kalangan ahli fiqih 10% memiliki dua arti yaitu, 10% pertama dari lahan pertanian yang disirami oleh air hujan. Ini termasuk zakat yang diambil dari orang muslim dan didistribusikan sebagaimana zakat. Dan 10% yang kedua diambil dari pedang-pedang kafir yang memasuki wilayah islam karena membawa barang

dagangan. Objek bea cukai ini adalah nilai barang dagang yang melintas wilayah pabean islam. Karena termasuk sumber pendapatan penuh maka ushr digunakan untuk kepentingan umum negara secara luas.

Pemerintah memiliki tugas penting dalam mewujudkan tujuan ekonomi islam secara keseluruhan. Sebagaimana yang telah diketahui, tujuan ekonomi islam adalah mencapai falah yang direalisasikan melalui optimasi masalah.

Adapun beberapa peran yang harus dilakukan oleh pemerintah di dalam mengoptimalkan falah

- a) Manajemen kekayaan public dalam rangka memaksimalkan kepentingan public
- b) Pemenuhan segala persyaratan untuk membangun Negara yang secara efektif tidak melindungi masyarakat dan kepentingan budaya.
- c) Menggali pemasukan untuk membiayai administrasi public dan tugas tugas pemerintah.
- d) Menjamin individu agar dapat meningkatkan efisiensi derajat kekayaan dan kesejahteraan.
- e) Menjaga keseimbangan sosial ekonomi, khususnya distribusi dan redistribusi kekayaan.
- f) Melindungi lingkungan ekonomi agar tetap sesuai dengan pendapatan Negara

#### **e. Faktor penyebab ketidaksamaan Pendapatan Asli Daerah**

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dipengaruhi oleh berbagai faktor fisik dan sosial ekonomi yang berbeda-beda di setiap daerah. terdapat sejumlah aspek umum yang dapat dijadikan dasar untuk menjelaskan perbedaan tingkat PAD antar daerah, antara lain (Fatmawatie, 2016)

##### 1) Faktor Geografis

Wilayah yang memiliki luas yang sangat besar cenderung mengalami ketimpangan dalam distribusi sumber daya, seperti

sumber energi, sumber daya pertanian, topografi, iklim, dan curah hujan. Kondisi ini membuat tidak semua bagian wilayah mendapatkan potensi yang sama. Namun, jika semua faktor lain dianggap sama, maka daerah dengan kondisi geografis yang lebih menguntungkan akan cenderung mengalami perkembangan yang lebih baik dibandingkan wilayah dengan kondisi geografis yang kurang mendukung

## 2) Faktor Historis

Kondisi historis suatu daerah turut memengaruhi arah dan tingkat pembangunan masyarakat di masa kini serta kesiapan mereka menghadapi masa depan. Struktur organisasi ekonomi yang berkembang di masa lalu berperan dalam membentuk sistem insentif bagi tenaga kerja maupun pelaku usaha. Misalnya, pada sistem feodal, insentif bagi pekerja sangat terbatas, sementara dalam sistem industri yang eksploitatif, pekerja bekerja tanpa waktu istirahat yang memadai. Ketidakseimbangan seperti ini, dalam konteks perencanaan ekonomi yang tidak berpihak, dapat menjadi penghambat dalam proses pembangunan daerah

## 3) Faktor Politik

Ketidakstabilan politik merupakan salah satu hambatan utama dalam proses pembangunan. Ketegangan politik yang berkelanjutan dapat menghambat pertumbuhan ekonomi karena menurunkan minat masyarakat untuk berusaha dan mengurangi kepercayaan investor terhadap suatu daerah. Selain itu, meskipun suatu pemerintahan bersifat stabil, namun jika lemah dalam menjalankan fungsi dan pengawasan—serta tidak mampu menekan perilaku korupsi dan kepentingan pribadi—maka kebijakan pembangunan yang dirancang cenderung gagal mencapai tujuannya.

## 4) Faktor Administrasi

Efisiensi dalam sistem administrasi pemerintahan turut memengaruhi tingkat kesenjangan antar wilayah. Kinerja aparatur

pemerintahan, khususnya para administrator, memiliki peran penting dalam pelaksanaan tugas-tugas pembangunan. Untuk mewujudkan fungsi pemerintahan yang efektif, dibutuhkan sumber daya manusia yang jujur, terdidik, terlatih, dan profesional. Administrasi yang berjalan secara efisien cenderung mampu mendorong keberhasilan pembangunan regional, sedangkan administrasi yang tidak efisien dapat menjadi faktor penghambat.

#### 5) Faktor Sosial

Masyarakat di daerah yang kurang berkembang umumnya belum memiliki kelembagaan maupun sikap (*attitude*) yang mendukung proses pembangunan ekonomi. Sebaliknya, masyarakat di wilayah yang lebih maju cenderung memiliki struktur kelembagaan yang lebih kuat serta sikap yang lebih terbuka dan positif terhadap upaya pembangunan, sehingga lebih siap dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah

#### 6) Faktor Ekonomi

Perbedaan pembangunan ekonomi antar wilayah dapat disebabkan oleh berbagai faktor ekonomi, seperti ketimpangan dalam kepemilikan dan pemanfaatan faktor produksi, proses kumulatif dari berbagai kondisi ekonomi yang saling berkaitan, serta terjebaknya suatu wilayah dalam siklus kemiskinan yang sulit diputus. Selain itu, dominasi mekanisme pasar bebas, adanya efek *backwash* (penyerapan potensi daerah oleh wilayah yang lebih maju), efek *spread* (penyebaran manfaat ekonomi), serta ketidaksempurnaan pasar juga berkontribusi dalam memperbesar ketimpangan pembangunan antar daerah.

### **f. Manfaat Pendapatan Asli Daerah**

Dana yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah berperan penting dalam mendukung pelaksanaan kewajiban daerah, khususnya dalam membiayai belanja rutin dan kegiatan pembangunan. Selain itu, Pendapatan Asli Daerah juga menjadi instrumen strategis untuk

meningkatkan penerimaan kas daerah, menunjang pelaksanaan pembangunan daerah, serta memperbaiki kondisi sosial dan ekonomi masyarakat sebagai pengguna layanan publik. Pengelolaan PAD ini tentunya melibatkan lembaga atau instansi khusus yang bertanggung jawab dalam pengaturannya secara efektif dan efisien (Nasir, 2019).

## **2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)**

### **a. Pengertian**

PDRB adalah jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha di suatu wilayah tertentu, atau jumlah barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit kegiatan ekonomi di suatu wilayah selama periode waktu tertentu (Mudji & Taripar, 2018).

Sukirno berpendapat PDRB adalah kenaikan output per kapita dalam jangka yang panjang, penekanannya ialah pada tiga aspek yakni proses, output per kapita, serta jangka panjang (Sukirno, 2000). Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan untuk seluruh wilayah usaha dan jasa dalam suatu wilayah, menerapkan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan seluruh unit ekonomi. PDRB sendiri dapat diartikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa oleh seluruh unit ekonomi di suatu wilayah (BPS 2016)

Menurut Badan Pusat Statistika Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yaitu hasil penjumlahan dari seluruh kegiatan perekonomian disuatu wilayah pada suatu periode waktu tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksinya berasal dari atau dimiliki oleh penduduk daerah tersebut. menurut Tarigan pengertian Produk Domestik regional Bruto (PDRB) adalah jumlah nilai tambah bruto yang timbul dari seluruh sektor perekonomian diwilayah tersebut (Tarigan, 2005).

Pengertian PDRB memiliki tiga sudut pandang yang berbeda tetapi memiliki pengertian yang sama yaitu

- 1) Menurut cara produksi, dimana jumlah produksi netto dari barang dan jasa yang dihasilkan daerah dalam jangka waktu tertentu (satu tahun). Unit-unit produksi tersebut dikelompokkan menjadi sembilan kelompok lapangan usaha, gas, air bersih, bangunan, perdagangan, hotel, dan restoran, pengangkutan dan komunikasi, keuangan, persewaan dan jasa perusahaan, serta jasa-jasa
- 2) Menurut cara pendapatan, PDRB adalah jumlah balas jasa yang diterima oleh berbagai faktor produksi termasuk upah, sewa tanah, bunga, modal, dan keuntungan sebelum dipotong pajak langsung lainnya. dalam pengertian PDRB, kecuali balas jasa faktor produksi diatas termasuk komponen penyusutan dan pajak tak langsung netto. Nilai tambah netto adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan seluruh bagian dari pendapatan ini secara sektoral
- 3) Menurut cara pengeluaran, PDRB adalah komponen permintaan aktif seperti pengeluaran konsumsi rumah tangga dan Lembaga swasta yang tidak mencari utang, konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap domestik bruto, perubahan stok dan ekspor netto

Dalam ketiga metode tersebut, jumlah barang yang dikurangi harus setara dengan jumlah komponen nilai tambah bruto yang dimasukkan dalam balas jasa faktor produksi. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menggambarkan kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan output (nilai tambah) pada suatu waktu tertentu. PDRB adalah nilai tambah bruto dari semua barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai aktivitas ekonomi selama periode waktu tertentu, tanpa memperhatikan apakah faktor produksi dimiliki oleh penduduk atau non-penduduk. Dari perspektif lapangan usaha, PDRB adalah penjumlahan seluruh bagian nilai tambah bruto yang dapat dihasilkan oleh lapangan usaha melalui berbagai aktivitas produksi.

Penyajian PDRB untuk setiap lapangan usaha dihitung berdasarkan nilai tambah total dari setiap lapangan usaha.

**b. Produk domestik regional bruto dalam perspektif islam berdasarkan AL-Qur'an dan Hadis**

1) QS. Al-Jumu'ah (62): 10

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ  
وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

Artinya : *Apabila salat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah...*" (QS. Al-Jumu'ah (62): 10)

Islam mendorong umatnya untuk bekerja dan berusaha setelah menunaikan ibadah. Peningkatan PDRB sejatinya merupakan refleksi dari aktivitas ekonomi masyarakat yang produktif, dan itu adalah bagian dari perintah agama — asalkan dilakukan dengan halal dan penuh tanggung jawab.

2) QS. Al-Mulk (67): 15

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ  
رِزْقِهِ ۗ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ ﴿١٥﴾

Artinya : *Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah dari rezeki-Nya...*" (QS. Al-Mulk (67): 15)

Ayat ini menegaskan bahwa Allah memberikan kemudahan kepada manusia untuk mengelola bumi dan mengambil manfaat darinya. PDRB yang meningkat karena pengelolaan sumber daya alam, pertanian, dan industri secara etis adalah bentuk penghargaan terhadap karunia Allah, namun harus tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan keseimbangan sosial.

## 3) QS. Hud (11): 61

غَيْرُهُ<sup>ط</sup> هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِّنَ الْأَرْضِ وَأَسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا

Artinya : *"Dia telah menciptakanmu dari bumi dan menjadikanmu sebagai pemakmur di bumi itu..."* QS. Hud (11): 61

Ayat ini menunjukkan bahwa manusia diberi amanah oleh Allah untuk memakmurkan bumi. Pembangunan ekonomi daerah yang tercermin dalam PDRB merupakan bagian dari aktivitas "isti'mar" (pembangunan). Oleh karena itu, peningkatan PDRB adalah hal yang baik dalam Islam jika dilakukan untuk memakmurkan masyarakat, bukan mengeksploitasi alam atau manusia secara tidak adil.

## 4) HR Tirmidzi No. 2346

أَطْيَبُ مَا أَكَلَ الرَّجُلُ مِنْ كَسْبِهِ

Artinya : *"Sebaik-baik makanan yang dimakan seseorang adalah dari hasil usahanya sendiri."* (HR Tirmidzi No. 2346)

Ayat ini menjelaskan PDRB tersusun dari hasil produksi dan usaha masyarakat daerah. Hadis ini menegaskan bahwa usaha mandiri dan produktif adalah tindakan mulia dalam Islam, dan penghasilannya adalah yang paling baik dan berkah. Jadi, PDRB tidak hanya indikator ekonomi, tapi juga refleksi kemandirian ekonomi umat.

## 5) QS. Al-Baqarah (2): 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ  
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ<sup>ع</sup>

Artinya : *"Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena tekanan penyakit gila..."* (QS. Al-Baqarah (2): 275)

Ayat ini memperingatkan agar kegiatan ekonomi tidak dibangun atas dasar sistem riba atau eksploitasi. Dalam konteks PDRB, pertumbuhan ekonomi yang tercatat tinggi tidak boleh bersumber dari sektor haram atau praktik yang merugikan masyarakat (seperti industri ribawi, perjudian, korupsi, atau monopoli). PDRB dalam Islam harus mencerminkan aktivitas halal dan produktif

### **c. Metode Penghitungan Produk domestik regional bruto**

Dalam produk domestik regional bruto ada 2 metode perhitungan yaitu metode langsung dan metode tidak langsung (Fatmawatie, 2016).

#### 1) Metode langsung

##### a) Pendekatan Produksi

Pendekatan produksi digunakan untuk menghitung nilai bersih (netto) dari barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh sektor ekonomi dalam satu tahun di seluruh wilayah. Penilaian terhadap barang dan jasa tersebut didasarkan pada harga produsen, yaitu harga sebelum ditambahkan biaya transportasi dan pemasaran. Hal ini dikarenakan biaya transportasi akan dicatat sebagai pendapatan pada sektor transportasi, sedangkan biaya pemasaran akan masuk sebagai pendapatan pada sektor perdagangan.

##### b) Pendekatan Pendapatan

Pendekatan pendapatan dihitung berdasarkan total imbalan yang diterima oleh seluruh faktor produksi yang terlibat dalam proses produksi di suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu, umumnya satu tahun. Imbalan tersebut mencakup upah dan gaji, sewa, bunga, serta laba. Dengan demikian, nilai tambah bruto merupakan akumulasi dari seluruh komponen tersebut sebelum dikurangi pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya.

### c) Pendekatan Pengeluaran

Pendekatan pengeluaran dihitung melalui penjumlahan seluruh komponen pengeluaran akhir dalam suatu wilayah selama periode tertentu, umumnya satu tahun. Komponen tersebut mencakup pengeluaran konsumsi rumah tangga, konsumsi lembaga swasta nirlaba, konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap domestik bruto, serta ekspor neto (yaitu selisih antara ekspor dan impor). Melalui pendekatan ini, nilai tambah bruto diperoleh berdasarkan penggunaan akhir atas barang dan jasa yang diproduksi di wilayah tersebut.

### 2) Metode tidak langsung

Dalam konsep penghitungan Produk Domestik Regional Bruto, terdapat dua pendekatan nilai, yaitu berdasarkan harga berlaku (*at current price*) dan harga konstan (*at constant price*). Keduanya memiliki makna dan fungsi interpretasi yang berbeda. Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga berlaku dihitung menggunakan harga yang berlaku pada tahun pengamatan, sehingga nilai yang dihasilkan masih mencerminkan pengaruh inflasi. Sementara itu, Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga konstan dihitung berdasarkan harga tetap pada tahun dasar tertentu, dengan menghilangkan pengaruh perubahan harga seperti inflasi atau deflasi. Tujuan utama penggunaan harga konstan adalah untuk mengukur pertumbuhan ekonomi secara riil, tanpa dipengaruhi oleh fluktuasi harga.

Untuk mengetahui maju tidaknya suatu perekonomian diperlukan adanya suatu alat pengukur yang tepat. Alat pengukur pertumbuhan perekonomian ada beberapa macam diantaranya (Suparmako, 2002)

- 1) Produk domestik bruto (PDB), Produk Domestik Bruto merupakan jumlah barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh

suatu perekonomian dalam satu tahun dan dinyatakan dalam harga pasar.

- 2) Produk domestik bruto per kapita (pendapatan perkapita), produk domestik bruto perkapita merupakan jumlah pdb nasional dibagi dengan jumlah penduduk atau dapat disebut sebagai PDB rata-rata atau PDB per kepala
- 3) Pendapatan per jam kerja, pendapatan per jam kerja merupakan upah atau pendapatan yang dihasilkan per jam kerja. Biasanya suatu negara yang mempunyai tingkat pendapatan atau upah per jam kerja lebih tinggi dari pada negara lain, boleh dikatakan negara yang bersangkutan lebih maju dari pada negara yang satunya

#### **d. Faktor yang mempengaruhi Produk Domestik Regional Bruto**

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dapat didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha atau sebagai jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu wilayah. PDRB juga dapat didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha atau sebagai jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit perekonomian di suatu wilayah. Ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan PDRB di Indonesia (Nasution, 2017).

##### **1) Pendapatan asli daerah**

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah, yang dibayar sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku. yang bertujuan untuk membangun hubungan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, daerah dilarang menetapkan peraturan pendapatan daerah yang menghasilkan biaya ekonomi yang tinggi. Ekonomi biaya tinggi adalah ketika suatu wilayah atau negara membayar lebih banyak dari yang seharusnya karena tarif dan

pungutan yang lebih tinggi serta “budaya korupsi”. Peraturan daerah tentang pendapatan tidak boleh dibuat oleh pemerintah daerah yang menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah, dan aktivitas impor atau ekspor. Yang dimaksud adalah peraturan daerah yang mengatur pengenaan pajak dan pengeluaran daerah terhadap hal-hal yang telah dikenakan pajak oleh pusat dan propinsi, sehingga mengurangi daya saing daerah

## 2) Penanaman modal asing

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 dalam Pasal 1 Ayat 9 Tentang Penanaman Modal, penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri

Menurut Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal Asing, Penanaman Modal Asing secara langsung dilakukan sesuai dengan undang-undang Indonesia, yang berarti pemilik modal secara langsung menanggung risiko dari penanaman modal tersebut.

Adapun modal asing dalam Undang Undang ini tidak hanya berbentuk valuta asing tetapi meliputi alat alat perlengkapan tetap yang diperlukan untuk menjalankan perusahaan di Indonesia, penemuan milik orang atau badan asing yang dipergunakan dalam perusahaan di Indonesia dan keuntungan yang boleh ditransfer keluar negeri tetapi dipergunakan kembali di Indonesia (Aminda & Rinda, 2019)

## 3) Dana bagi hasil

Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka presentase untuk mendanai kebutuhan dalam rangka

pelaksanaan desentralisasi ( UU No 33 tahun 2004 ) tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. DBH yang di transfer pemerintah pusat kepada pemerintah daerah terdiri dari dua jenis yaitu DBH pajak dan sumber daya alam

Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada pemerintah daerah berdasarkan persentase tertentu guna memenuhi kebutuhan pembiayaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi. Pelaksanaan DBH didasarkan pada prinsip sesuai dengan asal pendapatan, artinya bagian yang diterima oleh daerah bersumber dari pendapatan yang berasal dari wilayahnya masing-masing. Prinsip ini berlaku untuk seluruh komponen DBH, kecuali pada DBH sektor perikanan yang didistribusikan secara merata kepada seluruh kabupaten/kota. Selain itu, penyaluran DBH baik yang berasal dari pajak maupun sumber daya alam dilakukan berdasarkan realisasi penerimaan pada tahun anggaran berjalan (Arina et al., 2019)

#### 4) Dana alokasi umum

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang bertujuan untuk mewujudkan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah. DAU dimaksudkan untuk mengurangi ketimpangan fiskal melalui penerapan suatu formula yang memperhitungkan aspek kebutuhan dan potensi masing-masing daerah. Besaran DAU ditetapkan sekurang-kurangnya sebesar 25% dari total penerimaan dalam negeri. Dari jumlah tersebut, 10% dialokasikan untuk pemerintah provinsi, sementara 90% diberikan kepada pemerintah kabupaten/kota. Penentuan DAU untuk provinsi dilakukan dengan cara mengalikan total DAU seluruh provinsi dengan rasio bobot provinsi yang bersangkutan terhadap total bobot seluruh provinsi.

Demikian pula, DAU kabupaten/kota dihitung berdasarkan proporsi bobot masing-masing daerah terhadap total bobot seluruh kabupaten/kota.(Arina et al., 2019)

Dana alokasi umum berbentuk blok artinya penggunaan dari DAU ditetapkan sendiri oleh daerah, penggunaan dana alokasi umum dipakai untuk membiayai pelayanan kepada Masyarakat daerah. DAU ini dianggap pengganti subsidi daerah otonom dan dana impres di masa lalu. Dalam hal ini pad masi mengacu pada peraturan yang masih berlaku mengenai pajak dan retribusi daerah.

#### 5) Penanaman modal dalam negeri

Menurut undang undang nomor 25 tahun 2007, penanaman modal dalam negeri adalah penanaman modal dalam negeri secara langsung yang dilakukan sesuai dengan atau berdasarkan undang undang Indonesia, yang berarti bahwa pemilik modal secara langsung mengambil resiko dari penanaman modal tersebut.

Menurut (Bakari, 2017) Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) merupakan investasi yang memiliki tempat penting dalam ekonomi suatu negara karena sangat penting dalam mencapai pembangunan ekonomi (Bakari, 2017)

Menurut Putra (2018), Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) memiliki peran penting bagi pertumbuhan ekonomi negara. Kedudukan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang terpenting adalah pendapatan nasional karena dapat memanfaatkan kekayaan yang dimiliki oleh pihak negara (Putra, 2018)

#### **e. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sebagai Instrumen Pembangunan Ekonomi**

Keberhasilan pembangunan suatu negara ditentukan berdasarkan tingkat pertumbuhan pendapatan nasional yang dihasilkan pertumbuhan pendapatan inilah yang kemudian memacu kegiatan perekonomian tumbuh dan memicu barang yang dihasilkan didalam masyarakat bertambah. (Sukirno, 2003) mengemukakan terjadinya

pertumbuhan ekonomi karena terdapat perkembangan kegiatan didalam sistem perekonomian itu sendiri yang meliputi naiknya barang dan jasa yang di produksi di dalam Masyarakat

Pertumbuhan ekonomi menyangkut tentang perubahan kenaikan output ini berupa proses perubahan kondisi perekonomian secara dinamis dari waktu ke waktu, hal yang penting untuk di cermati adalah perkembangan itu sendiri. Didalam pertumbuhan ekonomi indikator yang berfungsi sebagai alat ukur di tingkat daerah adalah PDRB. Didalam PDRB menunjukkan jumlah nilai yang dihasilkan dari total barang dan jasa yang diperoleh dari seluruh objek ekonomi.

Hal yang membuat PDRB digunakan sebagai indikator pertumbuhan adalah

- 1) PDRB mencerminkan kondisi faktor produksi yang berada di output produksi barang dan jasa. karena didalam PDRB menggambarkan nilai tambah yang diperoleh dari kegiatan produksi di dalam perekonomian
- 2) PDRB menghitung hanya nilai di setiap produk pada tahun bersangkutan. sehingga dapat digunakan untuk membandingkan perubahan yang terjadi.
- 3) PDRB hanya menyangkut perhidungan daerah regional. sehingga dapat digunakan untuk mengukur kinerja kebijakan ekonomi yang di tentukan pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi

### **3. Jumlah Penduduk**

#### **a. Pengertian**

Menurut Bambang jumlah penduduk pada suatu wilayah atau negara pada dasar nya dapat di kelaskan sebagai suatu modal atau beban pembangunan yang mana hal ini bisa berdampak baik untuk negara jika di sertai dengan kualitas yang memadai baik tingkat kesehatan, pendidikan, maupun kemampuan beradaptasi dengan perkembangan teknologi sangat mendukung terhadap proses pembangunan negara. Namun jika kondisi yang terjadi sebaliknya maka

akan menjadi beban bagi pembangunan dan menjadi suatu hambatan bagi lajunya roda pertumbuhan ekonomi negara yang bersangkutan (Bambang, 2017).

Jumlah penduduk merupakan Masyarakat yang tinggal di suatu daerah, secara hukum berhak tinggal di daerah tersebut dengan kata lain orang yang mempunyai surat resmi tinggal di daerah tersebut. Dalam sosiologi jumlah penduduk adalah kumpulan manusia menempati wilayah geografi dan ruang tertentu. Di negara sedang berkembang yang mengalami ledakan jumlah penduduk termasuk Indonesia akan selalu mengaitkan antara kependudukan dengan pembangunan ekonomi. Akan tetapi hubungan antara keduanya tergantung pada sifat dan masalah kependudukan yang dihadapi oleh setiap negara.

Salah satu indikator paling penting dari suatu negara adalah jumlah penduduknya. Para ahli ekonomi klasik, termasuk Adam Smith, menganggap jumlah penduduk sebagai input yang dapat digunakan sebagai faktor produksi rumah tangga dan bisnis. Semakin banyak penduduk sebuah negara, semakin banyak tenaga kerja yang dapat dihasilkan. Robert Malthus, ahli ekonomi lain, berpendapat bahwa meskipun peningkatan jumlah penduduk kadang-kadang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pada kondisi optimal, peningkatan jumlah penduduk tidak akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi malah dapat menurunkannya (Mustika, 2011).

#### **b. Jumlah penduduk dalam perspektif islam berdasarkan AL-Qur'an dan Hadis**

1) QS. Al-Baqarah (2): 30

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰئِكَةِ اِنِّىْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِيْفَةً قَالُوْۤا اَتَجْعَلُ

Artinya : *Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: 'Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi.'"* (QS. Al-Baqarah (2): 30)

Ayat ini menjelaskan setiap manusia adalah khalifah (pemimpin) yang diberi tanggung jawab untuk mengelola dan memakmurkan bumi. Dalam konteks jumlah penduduk, semakin banyak penduduk, semakin besar pula potensi pembangunan asal dibina dan dikelola dengan baik. Penduduk bukan beban, tetapi penentu arah kemajuan suatu daerah jika mereka diberdayakan secara produktif.

2) QS. Al-Hujurat (49): 13

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَاهُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Artinya : *"Wahai manusia! Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal..."*( QS. Al-Hujurat (49): 13)

Ayat ini menjelaskan Allah menciptakan banyak manusia dalam berbagai kelompok dan komunitas sebagai fitrah sosial dan keragaman. Dalam konteks daerah, semakin besar jumlah penduduk dan komunitasnya, semakin banyak peluang untuk kolaborasi ekonomi, sosial, dan budaya, asalkan dipersatukan oleh nilai iman dan takwa.

3) QS. Al-Isra (17): 70

﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ﴾

Artinya : *"Dan sesungguhnya Kami telah memuliakan anak-anak Adam..."*( QS. Al-Isra (17): 70)

Ayat ini menjelaskan setiap penduduk daerah adalah manusia yang dimuliakan oleh Allah sehingga harus dihormati haknya: hak pendidikan, kesehatan, pekerjaan dan keadilan ekonomi. Pemerintah daerah wajib memastikan pendapatan asli daerah dan

kebijakan pembangunan diarahkan untuk memenuhi hak dasar mereka

4) QS. Al-A'raf (7): 10)

وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعِيشَةً قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ

Artinya : *"Dan sungguh, Kami telah menempatkan kamu di muka bumi dan Kami jadikan padanya sumber-sumber kehidupan untukmu..."* (QS. Al-A'raf (7): 10)

Ayat ini menjelaskan Allah telah menyediakan sumber daya alam di bumi untuk dinikmati oleh manusia. Jumlah penduduk yang besar harus disinergikan dengan potensi sumber daya alam, sehingga tercipta produktivitas dan kemandirian ekonomi daerah. Namun, ini hanya terjadi bila penduduk disiapkan dengan ilmu, iman, dan keterampilan.

5) Hadis Nabi SAW – HR. Abu Dawud No. 2050

تَزَوَّجُوا الْوُدُودَ الْوُلُودَ فَإِنِّي مُكَاتِّرٌ بِكُمْ الْيَوْمَ

Artinya : *"Menikahlah dengan wanita yang penyayang dan subur, karena aku akan berbangga dengan banyaknya umatku di hari kiamat."*

Hadis ini menunjukkan bahwa Nabi menganjurkan banyaknya keturunan (penduduk) sebagai hal yang dibanggakan. Namun, bukan sekadar jumlah, tetapi kualitas umat juga penting — yaitu yang beriman, berilmu, dan produktif. Maka, dalam konteks pembangunan daerah, jumlah penduduk yang besar adalah aset strategis, jika didukung dengan pengembangan SDM dan pemerataan kesejahteraan

### c. Komponen jumlah penduduk

Penduduk adalah setiap individu yang telah tinggal di wilayah tertentu di Indonesia selama enam bulan atau, atau yang telah tinggal selama kurang dari enam bulan tetapi memiliki niat untuk tinggal

disana. Dalam pertumbuhan penduduk terdapat 3 faktor yang mendorong pertumbuhan penduduk pada suatu wilayah yaitu fertilitas (jumlah bayi yang dilahirkan), mortalitas (seseorang yang tidak memiliki tanda-tanda kehidupan yaitu bernafas dalam dirinya) dan migrasi ( perpindahan penduduk dari suatu wilayah ke wilayah lain) (Damanik & Sidauruk, 2020).

#### 1) Fertilitas (kelahiran)

Pengukuran fertilitas lebih kompleks dibandingkan dengan pengukuran mortalitas karena seorang wanita hanya mati satu kali tetapi ia dapat melahirkan lebih dari seorang bayi. Di samping itu seseorang yang telah mati pada hari dan waktu tertentu tidak mempunyai resiko kematian yang ke dua kali. Sebaliknya seorang wanita yang melahirkan seorang anak tidak berarti resiko melahirkan dari wanita tersebut berhenti. Kompleksnya pengukuran fertilitas juga disebabkan karena keterlibatan dua orang (suami dan istri). Masalah yang lain yang di jumpai dalam pengukuran fertilitas adalah tidak semua wanita mengalami resiko melahirkan karena ada kemungkinan beberapa dari mereka tidak mendapat pasangan untuk berumah tangga juga pada wanita yang bercerai atau menjanda.

Suatu kelahiran disebut dengan lahir hidup (*live birth*) apabila pada waktu lahir terdapat tanda-tanda kehidupan seperti berteriak, bernafas, jantung berdenyut. Apabila pada waktu lahir tidak ada tanda-tanda kehidupan disebut lahir mati (*still birth*) yang dalam ilmu demografi tidak dianggap sebagai suatu peristiwa kelahiran. Kadang kala ada yang menyebut *Fertility* sama dengan *Fecundity*. *Fecundity* adalah kemampuan biologis wanita untuk menghasilkan anak lahir hidup.

Pengukuran fertilitas secara umum dibedakan menjadi dua, yaitu pengukuran fertilitas tahunan dan pengukuran fertilitas kumulatif.

##### a) Pengukuran Fertilitas Tahunan

Tingkat kelahiran kasar diperoleh dengan cara membandingkan jumlah kelahiran hidup pada suatu tahun dengan jumlah seluruh penduduk pada pertengahan tahun dikali dengan bilangan konstanta yaitu 1000

b) Pengukuran Fertilitas Kumulatif

Dalam pengukuran fertilitas kumulatif yang diukur adalah rata-rata jumlah anak yang dilahirkan oleh wanita waktu memasuki usia subur, sehingga melampaui batas reproduksinya umur (15-49) tahun.

2) Mortalitas (kematian)

Mortalitas atau kematian merupakan salah satu variabel demografi yang sangat penting karena berfungsi sebagai barometer tinggi rendahnya tingkat kesehatan penduduk di suatu daerah. Mortalitas didefinisikan sebagai peristiwa hilangnya tanda-tanda kehidupan seseorang secara permanen yang terjadi setiap saat setelah kelahiran hidup. Dengan kata lain, kematian hanya dapat terjadi apabila sebelumnya telah terjadi kelahiran hidup, karena hidup selalu dimulai dari kelahiran. Dalam studi demografi, ukuran-ukuran kematian digunakan untuk mengetahui tingkat kematian dalam suatu wilayah atau populasi dalam kurun waktu tertentu. Data ini sangat penting karena dapat memberikan gambaran mengenai tingkat kesejahteraan, kondisi kesehatan, serta efektivitas pelayanan kesehatan di suatu daerah.

Salah satu ukuran kematian yang umum digunakan adalah angka kematian bayi, yaitu angka probabilitas yang menggambarkan risiko kematian seorang bayi sejak lahir hingga menjelang ulang tahun pertamanya. Ukuran-ukuran kematian ini terdiri dari beberapa jenis, di antaranya adalah

a) Angka Kematian Kasar (*Crude Death Rate/CDR*)

Angka Kematian Kasar (Crude Death Rate/CDR) merupakan banyaknya kematian pada tahun tertentu setiap 1000 penduduk pada pertengahan tahun

Rumus :

$$CDR = \frac{D}{P} \times K$$

D : jumlah kematian

P : jumlah penduduk pd pertengahan tahun

k : bilangan konstanta; 1000

b) Angka Kematian Menurut Umur (*Age Specific Death Rate/ASDR*)

Angka Kematian Menurut Umur (*Age Specific Death Rate/ASDR*) adalah banyaknya kematian pada kelompok umur tertentu setiap 1000 penduduk pada pertengahan tahun

Rumus :

$$ASDR_i = \frac{D_i}{P_i} \times k$$

$D_i$  : jumlah kematian pada kelompok umur i

$P_i$  : jumlah penduduk kelompok umur I pada pertengahan tahun

k : bilangan konstanta 1000

c) Angka Kematian Bayi/AKB (*Infant Mortality Rate/IMR*)

Angka Kematian Bayi/AKB (*Infant Mortality Rate/IMR*) adalah banyaknya kematian bayi setiap 1000 kelahiran hidup pada tahun tertentu

Rumus :

$$IMR = \frac{D_o}{B} \times k$$

$D_o$  : jumlah kematian bayi pada tahun tertentu

B : jumlah kelahiran hidup pada tahun tertentu

k : bilangan konstanta 1000

d) Angka kematian balita/AKABA

Angka kematian bayi adalah banyaknya kematian anak usia di bawah lima tahun per 1000 anak usia di bawah lima tahun pada pertengahan tahun tertentu.

Rumus :

$$AKABA = \frac{D_{0-59}}{P_{m0-59}} \times k$$

$D_{0-59}$  : jumlah kematian anak usia 0-59 bulan atau 0-4 tahun

$P_{m0-59}$  : jumlah anak usia 0-59 bulan atau 0-4 tahun

$k$  : bilangan konstanta, 1000

e) Angka Kematian Ibu/AKI (*Maternal Mortality Rate/MMR*)

Angka kematian ibu adalah banyaknya kematian selama kehamilan atau 42 hari setelah berakhirnya kehamilan, akibat semua sebab yang terkait / diperberat oleh kehamilan atau penanganannya, bukan akibat kecelakaan/ cedera

Rumus

$$AKI = \frac{D_m}{B} \times k$$

$D_m$  : jumlah kematian ibu

$B$  : jumlah kelahiran hidup

$k$  : bilangan konstanta 100.000

3) Migrasi

Migrasi merupakan suatu proses yang sangat selektif mempengaruhi setiap individu dengan ciri-ciri ekonomi, sosial, pendidikan dan demografi tertentu, maka pengaruhnya terhadap faktor-faktor ekonomi dan non ekonomi dari masing-masing individu juga bervariasi. Variasi tersebut tidak hanya terdapat pada arus migrasi antar wilayah pada negara yang sama, tetapi juga pada migrasi antar negara.

Dalam studi demografi, Ukuran migrasi digunakan untuk mengukur tingkat pergerakan penduduk dari satu wilayah ke wilayah

lain dalam jangka waktu tertentu. Ukuran-ukuran ini penting untuk memahami dinamika penduduk dan dampaknya terhadap pembangunan daerah. Adapun macam-macam ukuran migrasi antara lain

a) Angka Mobilitas

Rasio dan banyaknya penduduk yang pindah secara lokal dalam jangka waktu tertentu dengan banyaknya penduduk.

$$m = \frac{M}{P}k$$

m = angka mobilitas

M = jumlah mover

P = Penduduk

K = 1000

b) Angka Migrasi Masuk

Angka yang menunjukkan banyaknya migran yang masuk per 1000 orang penduduk daerah tujuan dalam waktu satu tahun.

$$m1 = \frac{I}{P}k$$

M1 = angka migrasi masuk

I = jumlah migrasi masuk

P = penduduk pertengahan tahun

c) Angka Migrasi keluar

Angka yang menunjukkan banyaknya migran yang keluar per 1000 orang penduduk daerah asal dalam waktu satu tahun

$$m0 = \frac{O}{P}k$$

M0 = angka migrasi keluar

O = Jumlah migrasi keluar

P = penduduk pertengahan tahun

#### 4. Hubungan Antar Variabel

##### a. Hubungan PDRB Dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan data statistik yang merangkum perolehan nilai tambah dari seluruh kegiatan ekonomi yang terjadi dalam suatu wilayah pada periode tertentu. PDRB menjadi salah satu indikator utama untuk mengukur perkembangan dan struktur ekonomi daerah, serta menjadi cerminan arah pembangunan yang sedang atau telah berlangsung. Dalam konteks ini, PDRB diyakini memiliki hubungan yang erat terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), karena pertumbuhan ekonomi daerah mencerminkan potensi peningkatan penerimaan fiskal daerah

Perkembangan ekonomi suatu daerah tercermin melalui peningkatan pendapatan per kapita masyarakat. Pendapatan per kapita menggambarkan kemampuan masyarakat dalam membiayai pengeluarannya, termasuk konsumsi barang dan jasa. Menurut Todaro, pendapatan masyarakat merupakan salah satu ukuran kesejahteraan daerah. Ketika pendapatan masyarakat meningkat, maka tingkat konsumsi juga meningkat, yang pada akhirnya mendorong peningkatan aktivitas ekonomi. Peningkatan konsumsi tersebut berimplikasi pada naiknya permintaan terhadap barang manufaktur dan jasa, yang secara langsung akan memperluas basis pajak dan retribusi daerah (Todaro, 2006).

Semakin tinggi pendapatan seseorang, maka semakin besar pula kemampuannya dalam memenuhi kewajiban fiskal, seperti membayar pajak dan retribusi. Hal ini berarti bahwa peningkatan pendapatan per kapita secara langsung memperbesar potensi penerimaan PAD. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi PDRB suatu wilayah, semakin tinggi pula peluang bagi daerah untuk memperoleh sumber-sumber pendapatan asli secara mandiri

Pertumbuhan PDRB dapat meningkatkan kapasitas fiskal suatu daerah. Peningkatan ini terjadi karena pertumbuhan PDRB membuka ruang bagi pemerintah daerah untuk mengoptimalkan sistem perpajakan dan pungutan daerah lainnya. Penerimaan pajak yang meningkat ini

kemudian dapat dimanfaatkan untuk mendanai berbagai program pembangunan daerah

Hubungan antara PDRB dan PAD bersifat fungsional, di mana PAD merupakan salah satu fungsi dari PDRB. Dengan meningkatnya PDRB, maka penerimaan daerah melalui PAD juga akan meningkat. Penerimaan ini kemudian dapat digunakan untuk membiayai program pembangunan dan meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat. Dengan demikian, peningkatan PDRB diharapkan mampu mendorong produktivitas dan kesejahteraan daerah secara menyeluruh.

#### **b. Hubungan Jumlah Penduduk Dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Penduduk adalah setiap individu yang telah tinggal di wilayah Indonesia selama 6 bulan atau lebih dengan tujuan menetap disana. Komponen penduduk adalah mortalitas, migrasi dan fertilitas (Sudarsono, 2016,). jumlah penduduk memegang peranan penting karena berkontribusi langsung terhadap aktivitas ekonomi yang menjadi sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD), seperti pajak daerah, retribusi, serta pendapatan dari jasa dan produksi lokal.

Semakin besar jumlah penduduk, semakin tinggi pula potensi konsumsi, tenaga kerja, dan aktivitas produksi yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Aktivitas ini akan meningkatkan objek-objek pajak dan retribusi yang menjadi komponen utama PAD. Sebaliknya, jumlah penduduk yang terlalu kecil dapat menyebabkan pemanfaatan sumber daya menjadi tidak optimal, karena skala produksi dan konsumsi yang terbatas. Dalam hal ini, efisiensi ekonomi sulit tercapai. Di sisi lain, jumlah penduduk yang mencukupi bahkan berlebih, jika dikelola dengan baik, justru dapat mendorong optimalisasi penggunaan sumber daya, mendorong produksi dalam skala besar, dan pada akhirnya meningkatkan penerimaan daerah.

Dengan demikian, jumlah penduduk berpengaruh terhadap besar kecilnya Pendapatan Asli Daerah, baik secara langsung melalui

konsumsi dan produksi masyarakat, maupun secara tidak langsung melalui kapasitas fiskal pemerintah dalam menarik pajak dan retribusi dari kegiatan ekonomi yang meningkat (Oktiani & Al Muhariah, 2021).

## **B. Kajian Penelitian Yang Relevan**

1. Penelitian yang dilakukan (Adriani & Handayani, 2018) dalam penelitian yang berjudul “Pengaruh PDRB dan Jumlah Penduduk Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Merangin”. Berdasarkan analisis regresi maka dapat disimpulkan PDRB mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah kabupaten maringin. Sedangkan jumlah penduduk mempunyai pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pendapatan asli daerah.. Perbedaan terdapat pada tempat penelitian. Penelitian diatas bertempat di Kabupaten Merangin sedangkan penelitian yang akan diteliti peneliti bertempat provinsi Sumatera Barat.
2. Penelitian (Priyono & Handayani, 2021) dengan judul “Analisis Pengaruh PDRB, Inflasi, Jumlah Penduduk Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karisidenan Pati Tahun 2012-2018”. Berdasarkan hasil analisis regresi yang digunakan, maka dapat disimpulkan bahwa variabel PDRB, Inflasi dan jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karisidenan Pati. Persamaan penelitian yang dilakukan peneliti terletak pada variabel yang digunakan yaitu sama menggunakan variabel PDRB dan Jumlah Penduduk. Perbedaan penelitian dengan peneliti terdapat pada tempat penelitian dilakukan. Penelitian yang dilakukan Adriani dan Handayani bertempat di Karisidenan Pati sedangkan tempat peneliti provinsi Sumatera Barat.
3. Penelitian (Mayza et al., 2015) dalam yang berjudul “Pengaruh Pendapatan Perkapita, Jumlah perusahaan dan Jumlah penduduk Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Nabire Papua Tahun 2004-2013” menggunakan metode analisis regresi linear berganda. Pendapatan perkapita, jumlah perusahaan, jumlah penduduk berpengaruh positif dan

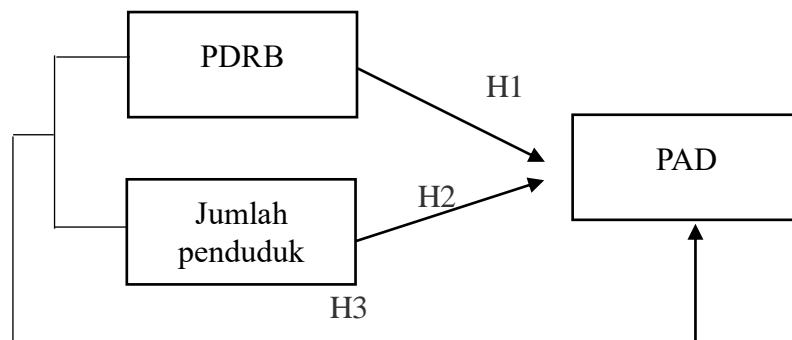
signifikan terhadap pendapatan asli daerah kabupaten Nabire Papua. Penelitian diatas dengan penelitian yang akan diteliti sama sama meneliti tentang pendapatan asli daerah dan salah satu variabelnya sama sama menggunakan jumlah penduduk. Perbedaan penelitiannya terletak pada tempat dan variabel bebas yang digunakan. Penelitian bertempat di Kabupaten Nabire Papua dengan variabel pendapatan perkapita, jumlah perusahaan dan jumlah penduduk sedangkan tempat penelitian peneliti yaitu provinsi Sumatera Barat dengan variabelnya pdrb jumlah penduduk.

4. Penelitian yang dilakukan (Amelia et al., 2023) yang berjudul “ Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Inflasi Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Aceh Tahun 2013-2022”. Penelitian ini menggunakan metode regresi linear berganda. Maka dapat disimpulkan bahwa Produk Domestik Regional Bruto berpengaruh positif namun tidak signifikan dan variabel inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Perbedaan penelitian dengan peneliti terletak pada variabel yang digunakan dimana penelitian menggunakan variabel PDRB dan Inflasi sedangkan peneliti menggunakan PDRB, jumlah penduduk. Perbedaan selanjutnya terdapat pada tempat penelitian, Penelitian diatas bertempat di Provinsi Aceh tahun 2013-2022 sedangkan penelitian yang akan diteliti peneliti bertempat provinsi Sumatera Barat tahun 1994-2023.
5. Penelitian yang dilakukan (Elidawaty Purba & Manurung, 2023) yang berjudul “ Pengaruh Jumlah Penduduk dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pematang Siantar Tahun 2010-2021” Berdasarkan analisis regresi maka dapat disimpulkan jumlah penduduk dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah. Perbedaan penelitian dengan peneliti terletak pada variabel yang digunakan dimana penelitian menggunakan variabel jumlah penduduk dan pertumbuhan ekonomi sedangkan peneliti menggunakan variabel Produk Domestik Regional Bruto dan Jumlah Penduduk. Perbedaan selanjutnya terdapat pada tempat penelitian, penelitian diatas bertempat di Pematang

Siantar tahun 2010-2021 sedangkan penelitian yang akan diteliti bertempat di Provinsi Sumatera Barat tahun 1994-2023

### C. Kerangka Berfikir

Berdasarkan pengetahuan yang didapatkan dari tinjauan literatur dan penelitian terdahulu maka penelitian ini akan menganalisis mengenai faktor tersebut yaitu PDRB dan jumlah penduduk yang dimana 2 faktor tersebut mempengaruhi pendapatan asli daerah. Hal ini kemudian dituangkan dalam bentuk sebuah kerangka analisis seperti dibawah ini.



**Gambar 2. 1**  
**Kerangka Berfikir**

### D. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah peneliti telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan berdasarkan teori relevan, belum didasarkan pada fakta yang empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data.

Hipotesis terbagi menjadi 2 bagian yaitu hipotesis null/nihil ( $H_0$ ) dan hipotesis alternatif ( $H_a$ ) (Zaki & Saiman, 2021). hipotesis null/nihil adalah hipotesis yang menyatakan tidak adanya hubungan antar variabel satu dengan variabel lainnya. Sedangkan hipotesis alternatif adalah hipotesis yang variabelnya aktif dan variabel tersebut memiliki hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya.

Berdasarkan penjelasan diatas mengenai hipotesis dapat diajukan hipotesisnya sebagai berikut:

- H<sub>0</sub>1 : Produk Domestik Regional Bruto tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Sumatera Barat.
- H<sub>a</sub>1 : Produk Domestik Regional Bruto berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Sumatera Barat.
- H<sub>0</sub>2 : Jumlah penduduk tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Sumatera Barat
- H<sub>a</sub>2 : Jumlah penduduk berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Sumatera Barat
- H<sub>0</sub>3 : Produk Domestik Regional Bruto dan Jumlah penduduk tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Sumatera Barat
- H<sub>a</sub>3 : Produk Domestik Regional Bruto dan Jumlah penduduk berpengaruh terhadap terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Sumatera Barat

### BAB III METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian pendekatan kuantitatif. Penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang menggunakan angka dengan penyajian data dan analisis menggunakan uji statistika

Penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif deskriptif yang mengetahui pengaruh Produk Domestik Regional Bruto dan jumlah penduduk terhadap pendapatan asli daerah provinsi Sumatera Barat

#### B. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan oleh penulis melalui website Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Barat

**Tabel 3. 1  
Waktu dan Tempat Penelitian**

No	Uraian Kegiatan	Waktu Penelitian							
		2024				2025			
		Jun	Jul	Agst-Nov	Des	Mrt	Aprl-Mei	Jun	Jul
1.	Survei Awal								
2.	Pengajuan Proposal								
3.	Membuat dan bimbingan proposal								
4.	Seminar Proposal								
5.	Bimbingan setelah seminar								
6.	Mengumpulkan dan menyiapkan data Penelitian								
7.	Mengolah data								
8.	Membuat Pelaporan								
9.	Bimbingan skripsi								
10.	Siding munaqasyah								

### C. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder, yang mana data ini penulis kumpulkan melalui website *bps.go.id* dan selanjutnya penulis kumpulkan data yang berkaitan dengan variabel penelitian

### D. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh beberapa yang diperlukan, maka peneliti menggunakan metode pengumpulan data dokumentasi yaitu laporan, Teknik dalam dokumentasi ini bertujuan untuk mengumpulkan data data yang diperlukan dalam permasalahan penelitian, serta juga dapat mendukung dan menambah kepercayaan dalam pembuktian suatu kejadian.

### E. Teknik Analisis Data

Untuk mendapatkan hasil sesuai dengan tujuan penelitian maka diperlukan teknis analisis data. Data yang digunakan untuk penelitian ini adalah data PDRB dan Jumlah penduduk terhadap pendapatan asli daerah dari BPS. Teknis analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

#### 1. Uji Asumsi Klasik

##### a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui distribusi data dalam variabel yang digunakan dalam penelitian dan sebaiknya dilakukan sebelum data diolah berdasarkan model penelitian. Oleh karena itu analisis tentang distribusi secara normal merupakan analisis pendahuluan dan menjadi prasyarat apakah suatu Teknik analisis statistika dapat digunakan untuk menguji hipotesis. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kolmogrov Smirnov untuk mengetahui normal atau tidaknya data yang digunakan. Uji normalitas dengan syarat sebagai berikut:

- 1) Jika  $\text{Sig} > 0,05$  maka berdistribusi normal
- 2) Jika  $\text{Sig} < 0,05$  maka data tidak berdistribusi normal

#### b. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji ada atau tidaknya korelasi anatar variabel independent dalam model regresi. Uji multikolinearitas digunakan untuk melihat keadaan atau kondisi dimana terjadi hubungan linear yang sempurna atau mendekati sempurna diantara variabel independenya, maka hubungan antara variabel independent terhadap variabel dependenya menjadi terganggu. Pengujian ada tidaknya gejala multikolinearitas dikerjakan dengan melihat nilai VIF (variance inflation factor) dengan syarat sebagai berikut:

- 1) Jika nilai tolerance  $> 0,1$  dan nilai VIF  $< 10$ , maka dapat disimpulkan tidak terdapat multikolinieritas diantara variabel independent
- 2) Jika nilai tolerance  $< 0,1$  dan nilai VIF  $> 10$ , maka dapat disimpulkan tidak terdapat multikolinieritas diantara variabel independent

#### c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk menilai apakah ada ketidaksamaan varian dan residual untuk semua pengamatan pada model regresi linear. Uji ini adalah salah satu uji asumsi klasik yang harus dilakukan dalam regresi linear. Jika asumsi heteroskedastisitas tidak terpenuhi, maka model regresi akan dinyatakan tidak valid sebagai alat peramalan. Pengujian heteroskedastisitas yang digunakan uji white test dengan dasar pengambilan

- 1) Jika Chi-Square hitung  $<$  dari Chi-Square tabel maka tidak terjadi heteroskedastisitas
- 2) Jika Chi-Square hitung  $>$  dari Chi- Square tabel maka terjadi heteroskedastisitas

#### d. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi dilakukan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu (residual)

pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode sebelumnya (t-1). Jika terdapat korelasi, maka model regresi mengalami masalah autokorelasi. Salah satu metode yang umum digunakan untuk mendeteksi autokorelasi adalah dengan uji Durbin-Watson (DW test)

Metode pengujian yang sering digunakan dalam penelitian kuantitatif adalah dengan uji Durbin Watson (uji DW) dengan ketentuan atau dasar pengambilan keputusan sebagai berikut:

- 1) Jika d (Durbin Watson ) lebih kecil dari dl. Atau lebih besar dari (4-dl), maka hipotesis nol ditolak, yang berarti terdapat autokorelasi
- 2) Jika Durbin Watson terletak antara du dan (4-dU), maka hipotesis nol diterima, yang berarti tidak ada autokorelasi
- 3) Jika d (Durbin Watson) terletak antara dl. dan du atau di antara (4-du) dan (4-d), maka tidak menghasilkan Kesimpulan yang pasti

## 2. Analisis Linear Regresi Berganda

Regresi linear berganda adalah regresi linear dimana variabel terikatnya ( variabel Y) di hubungkan dengan dua variabel lebih variabel bebas ( variabel X), fungsi regresi berkaitan erat dengan uji korelasi (korelasi pearson), karena uji regresi ini merupakan kelanjutan korelasi (KPM) dalam penyusunan peneliti skripsi menggunakan Teknik analisis data regresi berganda. Regresi berganda adalah hubungan secara dua variabel atau lebih variabel independent (X1 X2) dengan variabel dependen (Y) analisis ini untuk mengetahui hubungan antara variabel independent dengan variabel dependen apakah masing masing variabel independent berhubungan positif atau negative dan untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel independent mengalami kenaikan atau penurunan.

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Keterangan

Y- nilai prediksi variabel dependen ( pendapatan asli daerah)

- a. Konstanta
- b. Koefisien regresi variabel independent

$X_1 = \text{PDRB}$

$X_2 = \text{Jumlah penduduk}$

$e = \text{Error}$

### 3. Uji Koefisien Determinan ( $R^2$ )

Nilai koefisien determinan dapat digunakan untuk memprediksi atau memperbaiki seberapa besar kontribusi pengaruh variabel independent terhadap variabel dependen dengan syarat hasil uji f bernilai signifikan. Sebaliknya, jika dalam uji f tidak signifikan maka nilai koefisien  $R^2$  tidak dapat digunakan untuk memprediksi atau memperbaiki kontribusi pengaruh variabel terhadap dependen.

### 4. Uji Hipotesis

#### a. Uji Parsial ( Uji Statistik t )

Uji parsial digunakan untuk mengetahui pengaruh masing masing variabel independen terhadap variabel dependen. Caranya dengan membandingkan t hitung dengan t tabel, jika t hitung  $>$  t tabel maka berarti variabel independent secara individual mempengaruhi variabel dependen. Uji t digunakan untuk menguji apakah setiap variabel (independent) secara masing masing persian atau individual memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel terikat (dependen) pada tingkat signifikan 0,05. Pedoman dalam melaksanakan uji parsial adalah sebagai berikut

- 1) Jika nilai sig  $<$  0,05 dan t hitung  $>$  t tabel maka terdapat pengaruh variabel x terhadap variabel y
- 2) Jika nilai sig  $>$  0,05 dan t hitung  $<$  t tabel maka tidak terdapat pengaruh variabel x terhadap variabel y

#### b. Uji Simultan (Uji Statistik F)

Uji F adalah pengujian terhadap koefisien regresi secara simultan. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh semua variabel independent yang terdapat dalam model secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel dependen. Uji F dalam penelitian ini digunakan untuk menguji signifikan variabel produk domestik regional

bruto dan jumlah penduduk terhadap pendapatan asli daerah Sumatera barat secara simultan dengan kriteria pengujian sebagai berikut

- 1) Jika nilai sig  $< 0,05$  dan nilai f hitung  $> f$  tabel maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima
- 2) Jika nilai sig  $> 0,05$  dan nilai f hitung  $< f$  tabel maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak

## BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Gambar Umum Objek Penelitian

#### 1. Kondisis Geografis Sumatera Barat

Provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu provinsi di wilayah barat Pulau Sumatera yang memiliki karakteristik geografis yang khas. Secara astronomis, Provinsi Sumatera Barat terletak di antara 0°54' hingga 3°30' Lintang Selatan dan 98°36' hingga 101°53' Bujur Timur. Berdasarkan batas wilayah administratif, provinsi ini berbatasan dengan

- a. Sebelah utara : Provinsi Sumatera Utara
- b. Sebelah timur : Provinsi Riau dan Provinsi Jambi
- c. Sebelah selatan : Provinsi Bengkulu
- d. Sebelah barat : Samudera Hindia



**Gambar 4. 1**  
**Peta Sumatera Barat**

Luas wilayah daratan Provinsi Sumatera Barat mencapai 42.012,89 km<sup>2</sup>, dengan garis pantai sepanjang kurang lebih 375 km yang membentang dari utara ke selatan. Selain wilayah daratan, provinsi ini juga memiliki wilayah kepulauan, yaitu Kepulauan Mentawai, yang terletak di lepas Pantai barat Samudera Hindia dan menjadi bagian integral dari wilayah administratif provinsi.

Secara topografis, wilayah Provinsi Sumatera Barat didominasi oleh Pegunungan Bukit Barisan yang membujur dari utara ke selatan. Pegunungan ini terdiri atas gunung-gunung berapi aktif seperti Gunung Marapi, Gunung Singgalang, Gunung Talang, dan Gunung Tandikat, yang memberikan pengaruh terhadap kesuburan tanah serta sumber daya air di wilayah sekitarnya. Kondisi ini menjadikan sebagian besar wilayah Sumatera Barat memiliki kontur berbukit hingga bergunung

Kondisi geografis yang demikian menyebabkan pemusatan penduduk dan aktivitas ekonomi lebih terfokus di daerah dataran rendah dan lembah-lembah, seperti Lembah Anai dan Lembah Harau. Selain itu, keberadaan danau-danau besar seperti Danau Singkarak, Danau Maninjau, dan Danau Diatas-Dibawah juga memberikan nilai tambah dalam hal ketersediaan air bersih dan pengembangan sektor pariwisata. Kawasan pesisir Provinsi Sumatera Barat memiliki potensi besar dalam sektor perikanan dan wisata bahari, khususnya di wilayah Padang, Pesisir Selatan, dan Kepulauan Mentawai. Daerah-daerah ini juga memiliki kerentanan terhadap bencana alam seperti gempa bumi dan tsunami, mengingat letaknya yang berdekatan dengan zona subduksi antara Lempeng Indo-Australia dan Lempeng Eurasia

## **2. Jumlah Penduduk Sumatera Barat**

Provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu provinsi di Pulau Sumatera yang memiliki variasi jumlah penduduk di tiap kabupaten dan kota. Sebagian besar penduduk terkonsentrasi di kota-kota besar dan pusat pemerintahan, seperti Kota Padang dan Kabupaten Agam. Jumlah penduduk ini menjadi salah satu indikator penting untuk perencanaan pembangunan, pengalokasian anggaran, dan penyediaan layanan publik.

Menurut data terbaru yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Barat tahun 2023, berikut adalah rincian jumlah penduduk di tiap kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Barat

**Tabel 4. 1**  
**Nama-nama Kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat**  
**dan Jumlah penduduk**

<b>NO</b>	<b>Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Penduduk (jiwa)</b>
1	Kota Padang	942,94
2	Kabupaten Agam	551,89
3	Kabupaten Solok	410,43
4	Kabupaten Pasaman	313,20
5	Kabupaten Tanah Datar	383,68
6	Kabupaten Limah Puluh Kota	369,43
7	Kabupaten Pesisir Selatan	525,36
8	Kabupaten Dharmasraya	239,92
9	Kabupaten Solok Selatan	191,54
10	Kabupaten Sijunjung	243,71
11	Kabupaten Kepulauan Mentawai	91,43
12	Kota Bukittinggi	124,05
13	Kota Payakumbuh	144,83
14	Kota Sawahlunto	67,76
15	Kota Solo	77,84
16	Kota Padang Panjang	58,63
17	Pariaman	97,21
18	Kabupaten Padang Pariaman	451,39
19	Kabupaten Pasaman Barat	450,05

Sumber Data: [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id)

## **B. Deskripsi Data**

Dalam penelitian ini, data yang digunakan merupakan data sekunder dalam bentuk time series (deretan waktu) selama 30 tahun yaitu dari tahun 1994-2023. Metode yang digunakan yaitu Regresi linear berganda, dengan tujuan untuk menganalisis pengaruh antara variabel independent terhadap variabel dependen. Pada penelitian ini, alat analisis yang digunakan adalah SPSS 25. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh melalui website BPS.

**Tabel 4. 2**  
**Data penelitian**

<b>Tahun</b>	<b>PAD (Rupiah)</b>	<b>PDRB (Rupiah)</b>	<b>Jumlah Penduduk (jiwa)</b>
1994	44.896.400.000	6.475.855,84	4.265.900
1995	44.021.900.000	7.054.198,18	4.323.170
1996	48.613.700.000	7.054.198,18	4.390.000
1997	64.300.000.000	8.000.662,52	4.451.300
1998	43.958.300.000	7.458.575,95	4.473.300
1999	60.445.000.000	7.577.036,03	4.541.990
2000	85.157.000.000	7.868.237,63	4.241.605
2001	140.763.000.000	50.868.773,56	4.308.243
2002	213.254.000.000	54.814.630,08	4.375.078
2003	281.449.459.852	58.814.630,03	4.454.825
2004	375.074.888.149	63.241.537,73	4.523.815
2005	448.249.018.630	68.001.653,47	4.592.664
2006	494.929.542.751	73.120.057,49	4.661.863
2007	621.607.519.300	78.623.717,94	4.731.560
2008	790.087.767.747	95.222.959,02	4.801.852
2009	739.747.093	99.449.726,82	4.869.620
2010	1.006.820.947.269	105.017.739,45	4.865.331
2011	1.147.303.770.000	111.679.492,97	4.933.112
2012	1.225.466.022.712	118.724.424,67	5.000.184
2013	1.366.178.102.000	125.940.634,27	5.066.476
2014	1.729.222.284	133.340.836,44	5.131.882
2015	1.876.733.122,80	140.719.474,19	5.196.289
2016	1.964.148.975,80	148.134.243,89	5.259.528
2017	2.275.090.068,59	155.984.364,13	5.221.489
2018	2.134.010.519,50	163.996.189,04	5.382.077
2019	2.328.432.873,68	169.426.614,10	5.441.197
2020	2.255.072.985,43	172.205.571,30	5.534.472
2021	2.551.899.163,31	174.999.891,95	5.580.232
2022	2.851.966.014,8	182.629.142,51	5.640.629
2023	2.783.511.043,88	191.071.350,94	5.700.573

Sumber Data: [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id)

**Tabel 4. 3**  
**Data penelitian sesudah di transformasi**

<b>Tahun</b>	<b>PAD</b>	<b>PDRB</b>	<b>Jumlah Penduduk</b>
1994	24.53	15.68	15.27
1995	24.51	15.77	15.28
1996	24.61	15.84	15.29
1997	24.89	15.90	15.31
1998	24.51	15.82	15.31
1999	24.82	15.84	15.33
2000	25.17	15.88	15.26
2001	25.67	17.74	15.28
2002	26.09	17.82	15.29
2003	26.36	17.89	15.31
2004	26.65	17.96	15.32
2005	26.83	18.04	15.34
2006	26.93	18.11	15.35
2007	27.16	18.18	15.37
2008	27.40	18.37	15.38
2009	20.42	18.42	15.40
2010	32.24	18.47	15.40
2011	27.77	18.53	15.41
2012	27.83	18.59	15.42
2013	27.94	18.65	15.44
2014	21.27	18.71	15.45
2015	21.35	18.76	15.46
2016	21.40	18.81	15.48
2017	21.48	18.87	15.49
2018	21.55	18.92	15.50
2019	21.57	18.96	15.51
2020	21.54	18.95	15.53
2021	21.66	18.98	15.53
2022	21.77	19.02	15.55
2023	21.75	19.07	15.56

Sumber Data : Data Olahan SPSS

## C. Hasil Analisis Data

### 1. Uji Asumsi Klasik

Sebelum melakukan Uji Analisis Linear Berganda pada Hipotesis penelitian, salah satu syarat adalah melakukan Uji Asumsi Klasik yang terdiri dari Uji Normalitas, Uji Multikolinearitas, Uji Heteroskedastisitas dan Uji Autokorelasi

#### a. Uji Normalitas

Tujuan dari uji normalitas ialah untuk mengetahui apakah suatu populasi berdistribusi normal atau tidak. Di dalam uji normalitas digunakan bantuan uji One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test. Uji normalitas dikatakan normal apabila menghasilkan nilai signifikan Asymp. Sig. (2-tailed) di atas 0,05. Jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 maka data penelitian berdistribusi normal. Sebaliknya jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka data penelitian tidak berdistribusi normal.

**Tabel 4. 4**  
**Uji Normalitas**

		Unstandardized Residual
N		30
Normal Parameters <sup>a, b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.22025874
Most Extreme Differences	Absolute	.132
	Positive	.132
	Negative	-.074
Test Statistic		.132
Asymp. Sig. (2-tailed)		.195 <sup>c</sup>

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

*Sumber: Data Olahan SPSS 2.5*

Dari hasil uji normalitas di atas dengan menggunakan uji statistik One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test terlihat bahwa Asymp. Sig (2-tailed) berdistribusi normal karena hasil signifikansinya besar dari ( $\alpha = 0,05$ ) yaitu 0,195. Hal ini berkesimpulan data berdistribusi normal

### b. Uji Multikolinieritas

Uji Multikolinieritas bertujuan untuk mengetahui apakah data tersebut dapat gangguan korelasi antar variable dependen (terikat) atau variable independent (bebas). Untuk mengetahui adanya multikolinieritas maka dapat dilihat dari nilai Tolerance dan VIF (Variance Inflation Factor).

- 1) Jika nilai Tolerance  $> 0,1$  dan VIF  $< 10$  maka tidak terjadi Multikolinieritas.
- 2) Jika nilai Tolerance  $< 0,1$  dan VIF  $>$  maka terjadi masalah Multikolinieritas

**Tabel 4. 5**  
**Uji Multikolinieritas**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	481.963	112.326		4.291	.000		
	PDRB	1.486	.604	.632	2.459	.021	.338	2.962
	Jumlah Penduduk	-31.437	7.857	-1.028	-4.001	.000	.338	2.962

a. Dependent Variable: PAD

*Sumber: Data Olahan SPSS 2.5*

Berdasarkan hasil multikolinieritas diketahui bahwa nilai statistik VIF Produk Domestik Regional Bruto (X1) sebesar  $2,96 < 10$  dan nilai statistik VIF Jumlah Penduduk (X2) sebesar  $2,96 < 10$  dan nilai Tolerance PDRB (X1) sebesar  $0,33 > 0,1$  dan nilai Tolerance Jumlah Penduduk (X2) sebesar  $0,33 > 0,1$  maka dari hasil uji multikolinieritas yang terdapat pada tabel di atas tidak terjadi multikolinieritas

### c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk melakukan uji heteroskedastisitas, yaitu uji grafik plot, uji park, uji glejser, dan uji white (Ghozali, 2016). Untuk

menguji heteroskedastisitas dalam penelitian ini menggunakan metode white test

**Tabel 4. 6**  
**Uji Heteroskedastisitas**  
**Model Summary**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.315 <sup>a</sup>	.099	.033	9.35359

$$\text{Chi square hitung} = N \times \text{RSquare}$$

$$= 30 \times 0,099$$

$$= 2,97$$

$$\text{Chi Square Tabel} = 11,070$$

Berdasarkan hasil chi square hitung dan chi square tabel menunjukkan tidak terjadinya heteroskedastisitas di karenakan nilai chi square hitung lebih kecil daripada chi square tabel ( $2,97 < 11,070$ )

d. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel variabel ini tidak orthogonal. Variabel orthogonal adalah variabel independen yang sama dengan nol. Syarat tidak terjadi autokorelasi adalah  $DU < DW < 4-DU$

**Tabel 4. 7**  
**Uji Autokorelasi**  
**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.631 <sup>a</sup>	.399	.354	2.30102	1.751

a. Predictors: (Constant), Jumlah Penduduk, PDRB

b. Dependent Variable: Pendapatan asli daerah

*Sumber: Data Olahan SPSS 2.5*

Dalam menentukan autokorelasi ini membutuhkan data nilai DL dan DU yang diambil dari tabel Durbin-Watson serta nilai DW berdasarkan hasil output dari program SPSS 25. untuk  $k = 2$  dan  $n = 30$  dengan  $\alpha = 5\%$  diperoleh nilai  $DL = 1.2837$ ,  $DU = 1.5666$  dan  $DW = 1.751$ . Uji autokorelasi yang baik dalam penelitian adalah tidak terdapat masalah autokorelasi. Dengan menggunakan bantuan tabel Durbin-Watson dapat diketahui nilai  $DU = 1.5666 < DW = 1.751$  dan  $DW = 1.751 < 4 - DU (2.4334)$  artinya tidak terdapat masalah autokorelasi

## 2. Analisis Regresi Linier Berganda

Regresi linear berganda merupakan suatu metode analisa yang digunakan untuk menentukan ketetapan prediksi dan pengaruh yang terjadi antara variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y). Dari hasil pengelolaan atau estimasi yang telah dilakukan dengan menggunakan SPSS 25 dari data *time series*.

**Tabel 4. 8**  
**Uji Regresi Linear Berganda**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	481.963	112.326		4.291	.000
	PDRB	1.486	.604	.632	2.459	.021
	Jumlah Penduduk	-31.437	7.857	-1.028	-4.001	.000

a. Dependent Variable: Pendapatan asli daerah

*Sumber: Data Olahan SPSS 2.5*

Analisis regresi linear berganda digunakan untuk menguji pengaruh lebih dari satu variabel independent terhadap variabel dependent. Persamaan regresi linear berganda dapat ditulis sebagai berikut

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

$$Y = 481.963 + 1.486 X_1 - 31.437 X_2 + e$$

Dari persamaan regresi linear berganda diatas dapat disimpulkan bahwa

- a. Diperoleh nilai konstanta sebesar 481.963 yang merupakan nilai dari variabel Y ketika semua variabel independent (  $X_1$  dan  $X_2$  ) bernilai nol. Artinya jika tidak ada pengaruh dari variabel  $X_1$  (misalnya PDRB untuk pendapatan asli daerah), variabel  $X_2$  (jumlah penduduk untuk pendapatan asli daerah, maka nilai Y (variabel dependen) tetap berada pada angka 481.963. Nilai ini mencerminkan kondisi dasar atau rata rata tanpa adanya pengaruh variabel bebas.
- b. Diperoleh nilai koefisien regresi untuk variabel  $X_1$  (PDRB) sebesar 1,486. Hal ini berarti bahwa setiap kenaikan PDRB sebesar 1 satuan akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 1,486 satuan, dengan asumsi variabel independent lainnya dianggap tetap (konstan)
- c. Diperoleh nilai koefisien regresi untuk variabel  $X_2$  (Jumlah Penduduk) sebesar  $-31,437$ . Hal ini berarti bahwa setiap kenaikan jumlah penduduk sebesar 1 satuan justru menurunkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 31,437 satuan, dengan asumsi variabel independent lainnya tetap (konstan)

### **3. Uji Koefisien Determinan ( $R^2$ )**

Uji koefisien determinasi ditujukan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variabel terikat. Nilai koefisien determinasi ( $R^2$ ) adalah antara nol dan satu. Jika koefisien determinasi ( $R^2$ ) semakin besar atau mendekati 1, maka dapat dikatakan bahwa kemampuan variabel bebas (X) adalah besar terhadap variabel terikat (Y). hal ini berarti model yang digunakan semakin kuat untuk menerangkan pengaruh variabel bebas yang diteliti dengan variabel terikat

**Tabel 4. 9**  
**Uji Koefisien Determinan**  
**Model Summary**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.631 <sup>a</sup>	.399	.354	2.30102

a. Predictors: (Constant), Jumlah Penduduk, PDRB

*Sumber: Data Olahan SPSS 2.5*

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi model summary di atas menjelaskan bahwa nilai korelasi sebesar 0,631. Dari hasil tersebut diperoleh koefisien determinasi (R Square) sebesar 0.399 atau 39 %. Hal ini berarti bahwa 39 % pendapatan asli daerah dapat dijelaskan oleh variabel independen yaitu PDRB dan jumlah penduduk. Sedangkan sisanya 61% (100 % - 39,%) dapat dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini

#### 4. Uji Hipotesis

##### a. Uji Parsial / Uji T

Uji parsial (Uji T) merupakan uji yang bertujuan untuk menunjukkan mengenai seberapa jauh pengaruh suatu variabel independent yakni PDRB dan Jumlah Penduduk secara individual untuk menerangkan variasi variabel dependent yaitu pendapatan asli daerah di Indonesia, apakah ia berpengaruh signifikan terhadap variabel dependent atau tidak. Untuk mencari pada uji t nilai signifikan  $< \alpha = 0.05$  dan nilai  $t\text{-hitung} > t\text{-tabel}$ . Hasil uji analisis regresi coefficients dengan menggunakan SPSS versi 25 terlihat pada tabel di bawah ini.

Berdasarkan tabel dapat dilihat hasil uji parsial penelitian, untuk menjawab hipotesis, terlebih dahulu menentukan

**Tabel 4. 10**  
**Uji Parsial**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized	t	Sig.
		B	Std. Error	Coefficients		
1	(Constant)	481.963	112.326		4.291	.000
	PDRB	1.486	.604	.632	2.459	.021
	Jumlah Penduduk	-31.437	7.857	-1.028	-4.001	.000

a. Dependent Variable: Pendapatan asli daerah

*Sumber: Data Olahan SPSS 2.5*

$t_{\text{tabel}}$ :

$$n = 30$$

$$k = 2$$

$$T_{\text{tabel}} = (a/2 : n-k-1)$$

$$= (0,05/2 : 30-2-1)$$

$$= (0,025 : 27)$$

$$= 2.051$$

Berdasarkan hasil pengelolaan data pada maka diperoleh hasil yaitu :

- 1) PDRB berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah di provinsi Sumatera Barat tahun 1994-2023. Hal ini dibuktikan dengan nilai variabel X1 PDRB menghasilkan nilai sign < 0.05 ( $0.021 < 0,05$ ) dan nilai t-hitung > t-tabel ( $2,459 > 2,051$ ). Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa hasilnya signifikan, H01 ditolak dan Ha1 diterima yang berarti terdapat pengaruh antara variabel X1 terhadap Y
- 2) Jumlah penduduk berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah di provinsi Sumatera Barat tahun 1994-2023. Hal ini dibuktikan dengan nilai variabel X2 jumlah penduduk menghasilkan nilai sign < 0.05 ( $0,000 < 0.05$ ) dan nilai t-hitung > t-tabel ( $4.001 > 2.051$ ). dalam uji hipotesis jika t hitung ditemukan negative (-). Bilangan negatif tidak bermakna minus (

hitungan) namun bermakna pengujian hipotesis dilakukan di sisi kiri (Sarwono, 2011). Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa hasilnya signifikan,  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  1 diterima yang berarti terdapat pengaruh antara  $X_2$  dan  $Y$

b. Uji Simultan / Uji F

Uji simultan (Uji F) merupakan uji yang digunakan untuk menunjukkan apakah semua variabel independen atau variabel bebas yang digunakan dalam model regresi ini mempengaruhi secara bersama-sama terhadap variabel dependent

**Tabel 4. 11**  
**Uji Simultan**  
**ANOVA<sup>a</sup>**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	94.757	2	47.378	8.948	.001 <sup>b</sup>
	Residual	142.957	27	5.295		
	Total	237.714	29			

a. Dependent Variable: Pendapatan asli daerah

b. Predictors: (Constant), Jumlah Penduduk, PDRB

*Sumber: Data Olahan SPSS 2.5*

Diketahui:

$$n = 30$$

$$k = 2$$

$$F_{\text{tabel}} = (k : n - k)$$

$$= (2 : 30 - 2)$$

$$= (2:28)$$

$$= 3.34$$

Berdasarkan hasil pengolahan data pada tabel diatas, maka diperoleh hasil yaitu: Nilai sign < 0.05 ( 0.001 < 0.05) dan  $F_{\text{hitung}} > f_{\text{tabel}}$  ( 8.948 > 3.34) sehingga dapat disimpulkan bahwa hasilnya signifikan dan  $H_0$  ditolak sedangkan  $H_a$  diterima

Berdasarkan hasil pengolahan data yang di dapat dari tabel di atas dapat di simpulkan bahwa variabel independent yaitu Produk Domestik Regional Bruto dan Jumlah Penduduk secara bersama sama berpengaruh dan signifikan terhadap variabel dependent yaitu pendapatan asli daerah di Provinsi Sumatera Barat

#### **D. Pembahasan**

Penelitian ini merupakan pengujian dari pengaruh produk domestik regional bruto dan jumlah penduduk terhadap pendapatan asli daerah di provinsi Sumatera barat dalam rentang waktu dari tahun 1994 – 2023. Setelah melakukan beberapa pengujian yaitu uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi, lalu uji regresi linear berganda, uji hipotesis, serta uji R Square. Maka selanjutnya akan ditelaah lebih lanjut mengenai pengaruh dari masing-masing variabel yakni sebagai berikut

##### **1. Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Sumatera Barat**

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) memiliki koefisien regresi sebesar 1,486 dengan nilai t-hitung sebesar 2,459 dan nilai signifikansi sebesar 0,021. Nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari 0.05, maka dapat disimpulkan bahwa secara parsial, Produk Domestik Regional Bruto berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Adanya koefisien regresi yang bernilai positif menunjukkan bahwa hubungan antara Produk Domestik Regional Bruto dan Pendapatan Asli Daerah bersifat searah. Dengan kata lain, setiap peningkatan Rp 1 pada nilai Produk Domestik Regional Bruto diperkirakan akan menyebabkan peningkatan Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp1,486, dengan asumsi bahwa variabel lain tidak mengalami perubahan. Secara statistik, hal ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi aktivitas ekonomi suatu daerah, yang tercermin melalui nilai tambah bruto dari sektor-sektor ekonomi,

maka semakin tinggi pula potensi penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang dapat diperoleh daerah tersebut.

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori Peacock dan Wiseman, yang menyatakan bahwa perkembangan ekonomi akan mendorong peningkatan pemungutan pajak. Ketika ekonomi berkembang (ditunjukkan oleh PDRB yang tinggi), maka volume produksi barang dan jasa juga meningkat. Contohnya, sektor industri menghasilkan lebih banyak, pertanian mengalami panen melimpah, dan sektor jasa tumbuh pesat. Peningkatan aktivitas ekonomi ini memperluas objek pajak, seperti Pajak Restoran, Pajak Hotel, dan retribusi lainnya, yang secara langsung meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan Produk Domestik Regional Bruto di provinsi Sumatera Barat periode 1994-2023 di mencerminkan berkembangnya aktivitas ekonomi dan sektor produksi di daerah tersebut yang pada akhirnya memperluas basis pajak dan retribusi daerah. Hal ini secara langsung berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah.

Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Adriani & Handayani, 2018) dalam penelitiannya berjudul "Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto dan Jumlah Penduduk terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Merangin". Dalam penelitian tersebut Produk Domestik Regional Bruto berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah dengan nilai t-hitung sebesar 8,868, lebih besar daripada t-tabel sebesar 2,681 yang menunjukkan pengaruh signifikan.

Berbeda dengan penelitian (Mawar & Sroyer, 2021) dalam penelitian berjudul "Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto Dan Jumlah Penduduk Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Aceh". Penelitian ini menjelaskan bahwa Produk Domestik Regional Bruto tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah, dengan nilai t-hitung 1,798 lebih kecil daripada t-tabel 1,996. Perbedaan ini kemungkinan disebabkan oleh perbedaan kondisi ekonomi daerah, struktur PAD, atau basis pajak yang berbeda antara Sumatera Barat dan Aceh

## **2. Pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Sumatera Barat**

Jumlah Penduduk memiliki nilai koefisien regresi sebesar -31,437, t-hitung sebesar -4,001, dan nilai signifikansi (Sig.) sebesar 0,000. Nilai signifikansi tersebut lebih kecil 0,05, Maka dapat disimpulkan bahwa secara parsial, jumlah penduduk berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Koefisien regresi yang bernilai negatif mengindikasikan bahwa jumlah penduduk berpengaruh negatif terhadap Pendapatan Asli Daerah. Artinya, setiap peningkatan satu satuan jumlah penduduk justru menurunkan PAD sebesar 31,437 satuan, dengan asumsi variabel lainnya tetap. Hasil ini menunjukkan bahwa peningkatan jumlah penduduk di Provinsi Sumatera Barat yang diteliti belum memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah

Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan teori teori Revered Thomas Maltus menjelaskan Penduduk dapat mempengaruhi penerimaan pendapatan daerah. Dengan meningkatnya jumlah penduduk akan meningkatkan permintaan terhadap barang dan jasa yang di butuhkan. Hal ini selanjutnya dapat mendorong peningkatan produksi sehingga akan mengakibatkan adanya perluasan usaha dan pendirian usaha baru pada sektor produksi. Pendirian usaha baru akan menambah angkatan kerja yang bekerja sehingga pendapatan masyarakat akan cenderung meningkat. Dengan meningkatnya pendapatan masyarakat maka kemampuan untuk membayar pajak dan retribusi juga meningkat yang akan membawa pengaruh terhadap pendapatan asli daerah

Berdasarkan teori Revered Thomas Maltus hal tersebut belum terjadi di Provinsi Sumatera Barat. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, sebagian besar penduduk yang bertambah belum sepenuhnya masuk dalam sektor formal yang tercatat oleh pemerintah. Menurut (Juliansyah & Sulkadria, 2018) tingginya aktivitas ekonomi informal seperti pedagang kecil, buruh harian, dan pekerja lepas membuat

potensi penerimaan PAD menjadi rendah, karena aktivitas tersebut tidak dapat dikenai pajak secara optimal

Kedua, peningkatan jumlah penduduk tidak selalu diiringi dengan peningkatan kualitas penduduk. Jika pertumbuhan penduduk didominasi oleh masyarakat usia kerja yang tidak produktif, tidak memiliki keterampilan, atau tidak memiliki akses terhadap pekerjaan, maka mereka justru menjadi beban fiskal bagi daerah. Dalam hal ini, penduduk yang banyak hanya meningkatkan kebutuhan pelayanan publik, namun tidak memberikan kontribusi terhadap penerimaan pajak atau retribusi daerah.

### **3. Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto dan Jumlah Penduduk (PAD) di Provinsi Sumatera Barat**

Berdasarkan uji  $f$  yang telah dilakukan dalam penelitian ini maka dapat diperoleh hasil bahwa semua variabel independent dalam penelitian ini produk domestik regional bruto ( $X_1$ ) dan jumlah penduduk ( $X_2$ ) secara bersama sama berpengaruh signifikan terhadap variabel pendapatan asli daerah ( $Y$ ) dengan Nilai sign  $< 0.05$  ( $0.001 < 0.05$ ) dan  $F_{hitung} > F_{tabel}$  ( $8.948 > 3.35$ ).

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Saldi et al., 2021) yang berjudul “Analisis pengaruh PDRB dan jumlah penduduk terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kerinci” dimana hasil penelitiannya yaitu produk domestik regional bruto dan jumlah penduduk secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Namun, hasil ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Murib et al., 2018) dalam penelitiannya produk domestik regional bruto dan jumlah penduduk tidak memiliki pengaruh terhadap pendapatan asli daerah.

Perbedaan hasil penelitian ini kemungkinan disebabkan oleh perbedaan kondisi di masing-masing daerah. Salah satu faktornya adalah kemampuan keuangan daerah yang tidak sama, sehingga daerah dengan kemampuan keuangan yang rendah mungkin belum mampu mengelola dan menggali sumber PAD secara maksimal. Selain itu, kebijakan pemungutan

pajak yang belum berjalan dengan baik juga bisa menjadi penyebabnya, karena pajak yang seharusnya bisa diperoleh tidak terkumpul secara optimal. Hal lain yang juga berpengaruh adalah banyaknya kegiatan ekonomi yang dilakukan di sektor informal, seperti pedagang kecil atau buruh harian, yang tidak tercatat secara resmi dan tidak membayar pajak. Karena aktivitas ekonomi di sektor ini tidak masuk dalam sistem pajak daerah, maka meskipun jumlah penduduk bertambah atau kegiatan ekonomi meningkat, hal tersebut belum tentu berdampak langsung terhadap kenaikan Pendapatan Asli Daerah.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Jumlah Penduduk terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Sumatera Barat, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Berdasarkan hasil analisis linear berganda dan uji parsial (uji t), diketahui bahwa variabel Produk Domestik Regional Bruto ( $X_1$ ) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan demikian, semakin tinggi nilai produk domestik regional bruto di Provinsi Sumatera Barat maka semakin besar pula Pendapatan Asli Daerah yang di peroleh

2. Pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Berdasarkan hasil analisis dan uji parsial (uji t), Jumlah Penduduk ( $X_2$ ) menunjukkan pengaruh negative namun signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan kata lain peningkatan jumlah penduduk yang tidak di imbangi dengan peningkatan kualitas ekonomi dan pelayanan publik justru berpotensi menurunkan Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Sumatera Barat

3. Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto dan Jumlah Penduduk secara simultan terhadap Pendapatan Asli Daerah

Hasil uji simultan (uji F) menunjukkan bahwa secara bersama-sama variabel Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Jumlah Penduduk berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan sebelumnya, peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut

### **1. Bagi Pemerintah**

Pemerintah daerah diharapkan dapat mengoptimalkan sektor-sektor ekonomi unggulan yang terbukti mendorong peningkatan Produk Domestik Regional Bruto dan berdampak langsung terhadap peningkatan Pendapatan Asli daerah, seperti sektor industri, perdagangan dan jasa. Hal ini dapat dilakukan melalui kemudahan perizinan, peningkatan investasi daerah, serta pembangunan infrastruktur pendukung. Selain itu pemerintah daerah disarankan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui penyediaan pendidikan yang merata dan pelatihan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja. Hal ini bertujuan agar pertumbuhan jumlah penduduk tidak menjadi beban fiskal bagi daerah, melainkan mampu berkontribusi secara produktif terhadap pembangunan daerah dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

### **2. Bagi Peneliti Selanjutnya**

Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk menambahkan variabel variabel lain dalam model penelitian yang dapat mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah seperti tingkat investasi, angka kemiskinan, indeks pembangunan manusia (IPM), serta belanja pemerintah agar model analisis menjadi lebih komprehensif dan nilai koefisien determinasi ( $R^2$ ) meningkat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adriani, E., & Handayani, S. I. (2018). Pengaruh PDRB dan Jumlah Penduduk terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Merangin. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 8(2), 1–6.
- Alhusain, A. S. (2017). *Kebijakan dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam Pembangunan Nasional*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Ambya. (2023). *Ekonomi Keuangan Daerah*. CV. Anugrah Utama Raharja Anggota IKAPI.
- Amelia, D. N., Nurlina, Miswar, Nurfiani Syamsuddin, & Sufitrayati. (2023). Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Inflasi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Aceh. *Jurnal Sociohumaniora Kodepena (JSK)*, 4(2), 174–182.
- Aminda, R. S., & Rinda, R. T. (2019). Analisis Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri dan Pengaruhnya terhadap Pertumbuhan Eekonomi ( Tahun 2010-2018). *Madic*, 1, 103–109.
- Arina, M. M., Koleangan, R. A. M., Engka, D. S. M., & Ratulangi, U. S. (2019). Meylani M. Arina 1 , Rosalina A.M. Koleangan 2 , Deisy S.M. Engka 3 Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Magister Ilmu Ekonomi Universitas Sam Ratulangi. *Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah*, 20(01), 1–11.
- Asmuruf, M. F., Rumat, V. A., & Kawung, G. M. V. (2015). Pengaruh Pendapatan dan Jumlah Penduduk terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Sorong. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 15(05), 732.
- Azhar, I. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daaerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Langsa. *jurnal transformasi administrasi*, 164–174.
- Azminda, M. A. F., & Hailuddin, W. (2024). Pengaruh Pdrb, Inflasi, Pengeluaran Pemerinrah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Provinsi Ntb Tahun 2013 – 2022. *Jurnal Konstanta: Ekonomi Pembangunan*, 3(2), 47–72.
- Badan Pusat Statistik. (2023). Realisasi Pendapatan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Menurut Jenis Pendapatan (Ribu Rupiah), 2018-2020. In *Badan Pusat Statistik*.
- Bakari, S. (2017). *The Impact of Domestic Investment on Economic Growth: New Policy Analysis from Algeria*. Archive, Munich Personal RePEc.
- Bambang. (2017). *Geografi Membuka Cakrawala Dunia*. PT Setia Purna.

- Damanik, R. K., & Sidauruk, S. A. (2020). Pengaruh Jumlah Penduduk Dan Pdrb Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Darma Agung*, 28(3), 358.
- Elidawaty Purba, & Manurung, E. (2023). Pengaruh Jumlah Penduduk dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Pematang Siantar. *Jurnal Ekuilnomi*, 5(1), 1–8.
- Fatmawatie, N. (2016). *Otonomi daerah dan pendapatan daerah*. STAIN Kediri Press.
- Fauzan, M. (2006). *hukum pemerintahan daerah, kajian tentang hubungan keuangan antara pusat dan daerah*. UII press.
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariete IBM SPSS 2* (8 ed.). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gusfahmi. (2001). *Pajak Menurut Syariah*. Raja Drafindo Persada.
- Halim, A. (2008). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat.
- Hilmi, Marumu, M. N. H. D., Ramlawati, & Peuru, C. D. (2024). Pengaruh Jumlah Penduduk Dan Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Kabupaten Tolitoli. *JEBI (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam)*, 8(2), 20–27.
- Juliansyah, & Sulkadria. (2018). Analisis Perekonomian Daerah dan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan*.
- Juwita, R., & Widia, A. (2022). Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (Pdrb) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat. *Land Journal*, 3(1), 69–76.
- Mankiw, N. G. (2007). *Makroekonomi* (Edisi Keen). Erlangga.
- Mardiasmo. (2008). *Perpajakan Edisi Revisi*. CV andi offset.
- Mardiasmo. (2011). *Akuntansi Sektor Publik*. Andi.
- Mawar, M., & Sroyer, S. (2021). Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto dan Jumlah Penduduk Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Aceh. *Journal of Economics and Regional Science*, 1(1), 40–53.
- Mayza, M., Masbar, R., & Nasir, M. (2015). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (Pad) Provinsi Aceh. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 3(1), 9–16.

- Mudji, A., & Taripar, W. (2018). Analisa Produk Domestik Bruto (PDRB) Kota Malang. *PANGRIPTA Jurnal Ilmiah*, 1(1), 35–46. <https://jurnalpangripta.malangkota.go.id/index.php/PANGRIPTA/article/download/8/5>
- Murib, D., Koleangan, R. A. M., Tolosang, K. D., Pembangunan, J. E., Ekonomi, F., Bisnis, D., Sam, U., Manado, R., & Muribdemitianusyahoocom, E. (2018). Pengaruh Jumlah Penduduk, Pendapatan Perkapita, Pdrb Terhadap Pad Di Kabupaten Mimika Provinsi Papua. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 18(01), 23–33.
- Mustika, C. (2011). Pengaruh PDB dan Jumlah Penduduk Terhadap Kemiskinan Di Indonesia 1990-2008. *jurnal paradigma ekonomika*, 1(4), 12–23.
- Naibaho, F., Sondakh, J. J., & Tangkuman, S. (2021). Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) di kota manado. *105 Jurnal EMBA*, 9(3), 105–112. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/34600>
- Nasir, M. S. (2019). Analisis Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah Setelah Satu Dekadeotonomi Daerah. *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*, 2(1), 30.
- Nasution, H. S. (2017). Analisis Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Era Desentralisasi Fiskal Di Propinsi Banten Periode 2001:1-2009:4. *Media Ekonomi*, 29–48.
- Oktiani, A., & Al Muhariah, N. (2021). Pengaruh Jumlah Penduduk Dan Inflasi Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Perencanaan Pembangunan*, 1(1), 16–35.
- Peacock, J. W. (1961). *The Growth Of Public Expenditurein The United Kingdom*. Princeton University Press, Princeton.
- Prasetyo, A. A., Siwi, V. N., & Kundhani, E. Y. (2022). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah Jawa Tengah Tahun 2010-2018. *Jurnal Dinamika Ekonomi Rakyat*, 1(1), 37–56.
- Priyono, D., & Handayani, H. R. (2021). Analisis Pengaruh Pdrb, Inflasi, Jumlah Penduduk Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Eks Karisidenan Pati Tahun 2012 - 2018. *Diponegoro Journal of Economics*, 10(2), 1–10. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dje>
- Purwanti, N. D., & Dewi, R. M. (2014). Pengaruh jumlah kunjungan wisatawan terhadap pendapatan asli daerah kabupaten mojokerto tahun 2006-2013. *Jurnal Ilmiah*, 2(3), 1–12.

- Putra, W. (2018). *Perekonomian Indonesia : Penerapan Beberapa Teori Ekonomi Pembangunan di Indonesia*,. Raja Grafindo Persada.
- Rachman, A., & Restiatun, R. (2023). *Pengaruh Jumlah Penduduk Jumlah Kendaraan Bermotor Dan Tingkat Pengangguran Terbuka (Tpt) Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kalimantan Barat*. 27(2), 699–707.
- Ramadhan, P. R. (2019). Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Di Sumatera Utara. *JURNAL AKUNTANSI DAN BISNIS : Jurnal Program Studi Akuntansi*, 5(1), 81–87.
- Riawan Tjandra. (2004). *Beralih dari Paradigma “Desentralisasi Semu.”*
- Saldi, A. H., Zulghani, & Nurhayani. (2021). *Analisis pengaruh PDRB dan jumlah penduduk terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kerinci*. 10(3), 201–210.
- Sarwono, J. (2011). *Buku Pintar IBM SPSS Statistics 19*. PT Elex Media Komputindo.
- Sayifullah, S., & Emmalian, E. (2018). Pengaruh Tenaga Kerja Sektor Pertanian Dan Pengeluaran Pemerintah Sektor Pertanian Terhadap Produk Domestik Bruto Sektor Pertanian Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi-Qu*, 8(1), 66–81.
- Sudarsono, A. (2016). Jaringan Syaraf Tiruan Untuk Memprediksi Laju Pertumbuhan Penduduk Menggunakan Metode Backpropagation (Studi Kasus Di Kota Bengkulu). *Jurnal Media Infotama*, 12(1), 61–69.
- Suharyadi, D., Martiwi, R., & Karlina, E. (2018). Pengaruh Retribusi Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Terhadap PAD Kabupaten Bogor. *Jurnal Moneter*, 5(2), 125. <http://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/moneter>
- Sukirno, S. (2000). *Makroekonomi Modern*. Raja Grafindo Persada.
- Sukirno, S. (2003). *Pengantar Teori Makro Ekonomi*. PT.Raja Grafindo Persada.
- Suparmako. (2002). *Ekonomi Publik untuk Negara Berkembang*. BPFE yogyakarta.
- Tarigan, R. (2005). *Ekonomi Regional*. PT Bumi Aksara.
- Todaro, M. P. (1998). *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Erlangga.
- Todaro, M. P. (2006). *Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga*. Erlangga.

- Winda Naraswari, N. N., Manan, A., & Agustiani, E. (2024). Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (Pdrb), Investasi, Jumlah Penduduk, Dan Inflasi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Ntb Tahun 2010-2022. *Jmm Unram - Master of Management Journal*, 13(1), 100–117.
- Yani, A. (2008). *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di Indonesia*. Raja Grafindo Persada.
- Zaki, M., & Saiman, S. (2021). Kajian tentang Perumusan Hipotesis Statistik Dalam Pengujian Hipotesis Penelitian. *JHIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 4(2), 115–118.
- Zumardi, A. D., & Sanica, I. G. (2020). Strategy To Optimize Regional Original Income Of Badung Regency ( Pad ) From E-Commerce. *Ilmiah Manajemen Bisnis Dan Inovasi Universitas Sam Ratulangi*, 7(3), 548–557.